





# Ekosistem Informasi Pandemi di Jakarta

Studi Ketimpangan Pasokan dan Permintaan Informasi Selama Pandemi

2021











# Ekosistem Informasi Pandemi di Jakarta

Studi Ketimpangan Pasokan dan Permintaan Informasi Selama Pandemi

2021



### Ekosistem Informasi Pandemi di Jakarta:

### Studi Ketimpangan Pasokan dan Permintaan

### Informasi Selama Pandemi

Dipublikasikan pada November 2021 oleh Remotivi

### Peneliti Utama

Muhamad Heychael

Yovantra Arief

### Peneliti

Muhammad Fajar

### Peneliti Lapangan

Aldo Serena

Andi Rahmana Saputra

Diah Enggarwati

Muhammad Soufi Cahya Gemilang

Muhammad Fawwaz Rifasya

Natasha Devanand Dhanwani

### **Koordinator Lapangan**

Svaradiva Anurdea Devi

### Koordinator Coder Analisis Isi

Rangga Naviul Wafi

### Coder Analisis Isi

Fadhilah Afsari Rusyidah

Hanifah Islamiyah

Winona Amabel

Wintang Warastri

### **Editor**

Geger Riyanto

### Tata Letak dan Desain Grafis

Gendis Kendra Disa

### **Foto Sampul**

Hakan Nural di Unsplash

Pam Menegakis di Unsplash

Daniel Schludi di Unsplash

Kecuali dinyatakan berbeda, seluruh isi laporan ini dilindungi dengan lisensi Creative Common Attribution 3.0







01

**Daftar Isi** 

03

### Ringkasan Eksekutif

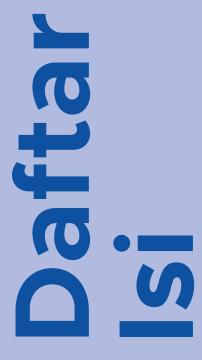
- 03 Pasokan Informasi
- 04 Permintaan Informasi
- 07 Kesenjangan Informasi

10

Bab 01 Latar Belakang 13

### Bab 02 Metodologi & Keterbatasan Penelitian

- 13 Metodologi
- 13 Ruang Lingkup Studi
- 14 Unit Analisis
- 15 Metode Penelitian
- 24 Keterbatasan Penelitian
- 24 Bias Pemilihan Kelurahan dan RT
- 24 Perubahan Tahapan Penelitian karena Pandemi
- 25 Adaptasi Teknik Penelitian karena Pandemi
- 25 Analisis Isi



34 Kebijakan Komunikasi Pandemi

44 Arus Informasi Seputar Pandemi di Jakarta

47 Kendala di Lapangan

49 Agenda *Setting* Media: Dominasi Jakarta dan Isu Kesehatan **59** 

Bab 04 Sisi Permintaan Informasi

59 Kebutuhan Informasi dari Media: Ekonomi Menjadi Faktor Dominan

73 Akses Media: Dominasi Media Sosial, Televisi, dan Saluran Komunikasi di Tingkat RT

83 Kepercayaan pada *Platform*Media

91 Pengaruh

105

Bab 05 Kesimpulan & Rekomendasi

105 Kesimpulan

111 Rekomendasi

117

Referensi

# Ringkasan Eksekutif

Pada masa pandemi, warga mengalami bermacam kesulitan untuk menavigasi kehidupan mereka sehari-hari. Pandemi telah memaksa warga untuk beradaptasi dengan situasi yang tidak pernah mereka hadapi sebelumnya. Dengan metode *information ecosystem analysis* (IEA), kami ingin menjawab beberapa pertanyaan berikut: bagaimana pasokan informasi seputar pandemi kepada warga? Informasi apa yang diminta warga? Dan seperti apa kesenjangan informasi yang muncul antara pasokan informasi dan kebutuhan riil warga?

Detail dari temuan-temuan penelitian lapangan kami adalah sebagai berikut:

### **Pasokan Informasi**

- Pemerintah memprioritaskan pesan-pesan ekonomi dibandingkan pesan-pesan kesehatan dalam komunikasi publik mereka.
- Pemerintah pusat cenderung menganut prinsip komunikasi publik yang bertujuan menciptakan stabilitas di masyarakat. Prinsip ini berusaha diterapkan oleh pemerintah tidak hanya kepada institusi pemerintah, tetapi juga institusi di luar negara seperti media massa.
- Pemerintah pusat memiliki kendala melakukan koordinasi antara institusi negara di tingkat pusat karena beragamnya institusi yang berhubungan dengan penanggulangan pandemi dan terlalu banyaknya aturan yang harus diterapkan oleh kelurahan.
- Pengembangan solusi-solusi digital pemerintah memiliki masalah terkait manajemen data dan tumpang tindih fungsi.

- Pemberitaan media selama semester pertama tahun 2021 berpusat pada isu-isu kesehatan yang mencakup vaksinasi, BPJS kesehatan, dan infrastruktur kesehatan.
- Pemberitaan pandemi di media massa cenderung mengangkat kejadian-kejadian pandemi di Jakarta dibandingkan di daerah lain. Perbandingannya untuk berita dari televisi terestrial free to air bersiaran nasional adalah 41% berita berasal dari Jakarta berbanding dengan 47% berita dari kota-kota selain Jakarta. Untuk berita dari media daring, Jakarta mendominasi dengan 59,1% berita dibandingkan dengan 18,2% berita daring dari kota-kota selain Jakarta.
- Baik di Jakarta maupun kota selain Jakarta, isu kesehatan mendominasi dibandingkan isu-isu lainnya. Untuk media televisi, isu kesehatan cukup dominan di Jakarta (70,3%) dan kota selain Jakarta (71,8%). Untuk media daring, isu kesehatan juga mendominasi di Jakarta (69,2%) dan kota-kota selain Jakarta (70,4%).

### **Permintaan Informasi**

- Terkait kebutuhan informasi warga di sektor kesehatan, informasi yang paling dibutuhkan warga adalah yang terkait obat-obatan, baik di wilayah rawan miskin (24,5%) dan tidak rawan miskin (23,3%).
- Di sektor ekonomi, informasi yang paling dibutuhkan warga adalah yang terkait bantuan tunai langsung, baik di wilayah rawan miskin (41%) dan tidak rawan miskin (29%).
- Di sektor pendidikan, warga di wilayah rawan miskin paling membutuhkan informasi seputar bantuan kuota pulsa (36%).
   Sementara itu, bagi warga di wilayah tidak rawan miskin, informasi mengenai rencana belajar tatap muka paling dicari oleh warga (47%).

- Saat mencari informasi di tingkat RT, warga juga kurang menemukan informasi mengenai vaksinasi, baik di wilayah rawan miskin (32%) dan tidak rawan miskin (27%).
- Saat mencari informasi di tingkat RT, warga laki-laki kurang menemukan informasi mengenai kebijakan ujian sekolah, sementara warga perempuan kurang dapat menemukan informasi mengenai bantuan kuota pulsa.
- Warga sangat mengandalkan media sosial (45%) dibandingkan media lain untuk mengakses informasi seputar pandemi. Facebook menjadi media sosial yang paling digemari warga untuk mencari informasi seputar pandemi (62.35%).
- Televisi menjadi sumber informasi andalan kedua bagi warga dalam mengakses informasi seputar pandemi (31,5%). tvOne adalah stasiun televisi yang menjadi sumber informasi utama warga seputar pandemi (53,50%).
- Sebanyak 88% responden penelitian juga mengaku menggunakan saluran komunikasi di tingkat RT untuk memperoleh informasi pandemi.
- Mayoritas warga juga cenderung membagikan informasi kepada teman dan keluarga (79,50%). Hal ini berlaku baik di wilayah rawan miskin dan tidak rawan miskin.
- Meskipun media sosial paling banyak digunakan, media arus utamalah yang paling dipercaya warga. Data ini konsisten baik di wilayah rawan miskin (45%) dan tidak rawan miskin (35%). Media sosial menjadi *platform* kedua yang paling dipercaya warga di wilayah rawan miskin (23%) dan tidak rawan miskin (23%).
- Interaksi langsung menjadi saluran informasi yang dipercaya warga di wilayah rawan miskin (50%) dan tidak rawan miskin (36%).

- Sebanyak 86,5% warga menganggap pemerintah cukup terbuka terhadap isu-isu kesehatan, tetapi warga memiliki persepsi paling negatif terhadap pemerintah di sektor ekonomi (37,5%).
- Warga adalah yang paling mengikuti anjuran pemerintah pusat (40%) terkait pandemi dibandingkan dengan RW/RT (22%), Pemerintah Kota DKI Jakarta (15%), tenaga kesehatan (11%), tokoh agama (3,5%), keluarga (2,5%) dan pihak lain (6%).
- Dari total responden, 66% menyampaikan kebutuhan mereka kepada pemerintah terkait isu-isu pandemi.
- Persepsi kinerja dan transparansi pemerintah rendah, terutama di bidang pendidikan dan ekonomi. Terkait kinerja dan transparansi di bidang pendidikan, 50% responden menganggap pemerintah kurang atau tidak berhasil dan 30,5% responden menilai pemerintah kurang atau tidak terbuka. Terkait kinerja dan transparansi di bidang ekonomi, 68% responden menilai pemerintah kurang atau tidak berhasil dan 38,5% menilai pemerintah kurang atau tidak terbuka.
- Pemerintah pusat adalah pihak yang paling banyak diikuti anjurannya oleh responden (40%), diikuti oleh RT/RW (22%), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (15%), dan tenaga kesehatan (11%).
- Hanya 1,5% responden yang menggunakan, dan 3% yang mempercayai aplikasi dan situs web pemerintah.

### Kesenjangan Informasi

- Dalam FGD dengan warga, kami menyimpulkan bahwa persepsi tentang transparansi tidak terbentuk dari akuntabilitas anggaran dan kinerja pemerintah, melainkan dari seberapa besar informasi pemerintah membantu warga mengakses kebijakan dan bantuan.
- Terdapat kesenjangan informasi di mana informasi yang berusaha disampaikan oleh pemerintah pusat justru menimbulkan kesulitan di tingkat kelurahan, terutama dalam pelaksanaan kebijakan.
- Tingginya kepatuhan terhadap pemerintah pusat menimbulkan masalah bagi warga ketika kebijakan pemerintah pusat bertentangan dengan Pemprov DKI Jakarta di lapangan.
- Rendahnya kesadaran dan pemakaian warga atas solusi digital pemerintah, baik pusat maupun DKI Jakarta, menunjukkan bahwa solusi-solusi tersebut tidak menjawab kebutuhan warga.
- Meskipun pemerintah telah menyebarkan informasi dalam berbagai bentuk melalui berbagai kanal informasi, kami menemukan sebagian besar warga masih kesulitan mengakses informasi praktis di sektorsektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Misalnya, 40,58% warga mengaku mereka sangat membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai bantuan langsung tunai yang tidak mereka dapatkan di saluran tingkat RT.
- Perhatian warga terhadap isu PPKM berbeda berdasarkan karakteristik wilayah. Warga di wilayah rawan miskin tidak terlalu membutuhkan informasi tersebut sementara warga di wilayah tidak rawan miskin justru cukup membutuhkan.
- Kami tidak menemukan kesenjangan kebutuhan warga saat mengakses saluran komunikasi tingkat RT di sektor ekonomi karena warga di kedua wilayah sama-sama membutuhkan informasi mengenai bantuan langsung tunai.

- Di sektor pendidikan, warga di daerah rawan miskin jauh lebih membutuhkan informasi mengenai WiFi gratis dibandingkan warga di wilayah tidak rawan miskin. Sementara itu, warga di wilayah tidak rawan miskin justru lebih membutuhkan informasi mengenai belajar tatap muka dibanding warga di wilayah rawan miskin.
- Berdasarkan aspek gender, kami melihat kesenjangan kebutuhan informasi antara laki-laki dan perempuan dengan variasi paling mencolok di sektor pendidikan.

# Latar Belakang





# **Latar Belakang**

Jakarta merupakan salah satu kota yang mengalami pukulan paling keras ketika pandemi Covid-19 melanda. Hingga 3 Oktober 2021, Jakarta memiliki 858.069 kasus positif Covid-19, atau 20,3% dari kasus nasional, menjadikannya kota dengan kasus positif paling banyak di Indonesia.

Pandemi tak hanya berdampak pada kesehatan publik, melainkan juga berbagai aspek kehidupan lain. Pertumbuhan ekonomi Jakarta mengalami kontraksi 2,36% pada 2021 (idxchannel.com, 2021). Hingga Juli 2020, tingkat kesenjangan ekonomi Jakarta pun melebar (Katadata. com, 2021). Tingkat kemiskinan mencapai titik tertinggi selama 20 tahun terakhir yakni sebesar 4,72% (BPS Jakarta, dalam Katadata.com, 2021). Dari segi pendidikan, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ), ditambah dengan belum meratanya infrastruktur dan literasi digital di Indonesia membuat proses belajar mengajar terhambat. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memperkirakan pelajar butuh sembilan tahun untuk mengejar ketertinggalan akibat PJJ yang tidak efektif (CNNIndonesia.com, 2021).

Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menangani pandemi dengan total anggaran mencapai Rp800 triliun pada 2020 (CNNIndonesia.com, 2020). Jakarta sendiri memiliki anggaran Rp10 triliun, yang sebagian besar dialokasikan untuk jaring pengaman sosial (Kompas.com, 2020). Besarnya anggaran serta tingginya prioritas penanganan pandemi menjadikan akuntabilitas dan transparansi pemerintah sangat krusial. Agar kebijakan menjangkau sebanyak mungkin warga yang terdampak pandemi, sistem informasi yang terbuka dan efektif tak bisa ditawar.

Kajian ini berupaya memahami peran ekosistem informasi dari

komunitas warga di Jakarta dalam mengakses berbagai kebijakan penanganan pandemi. Ekosistem ini mencakup pasokan informasi (supply side) dan permintaan informasi (demand side). Kajian ini memetakan pola permintaan dan pasokan informasi untuk menemukan celah kesenjangan antara keduanya yang perlu diisi.

Kajian ini merupakan kajian paduk (baseline study) untuk memandu pelaksanaan program "Media Empowerment for Democratic Integrity and Acascountability" (Media) USAID-Internews. Program ini bertujuan memperkuat demokrasi lewat peningkatan ketersediaan dan akses informasi berkualitas bagi masyarakat (dalam skala lokal dan nasional) dengan cara memperkuat kapasitas masyarakat sipil untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas kebijakan pemerintah.



Aldo Serena/Remotivi

Salah satu sudut gang di Kelurahan Koja, RT 007/RW 009.

# Metodologi & Keterbatasan Penelitian



# Metodologi

Kami menggunakan *information ecosystem analysis* (IEA) sebagai pendekatan utama penelitian kami. IEA adalah pendekatan untuk melihat dinamika arus informasi yang beredar di suatu komunitas dengan memperhatikan tiga elemen utama: pasokan informasi (*supply*), kebutuhan informasi (*demand*) dan kesenjangan antara keduanya (*information gap*) (Internews, 2020). Pendekatan IEA diterapkan dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

### **Ruang Lingkup Studi**

Kami memilih Jakarta sebagai lokasi utama penelitian kami. Alasan terbesar memilih Jakarta adalah karena kota ini merupakan ibukota dan menjadi salah satu kota pertama yang terdampak pandemi (Velarosdela, 2021). Jakarta juga menjadi kota dengan infrastruktur kesehatan tertinggi di Indonesia sehingga dengan menilai apa yang terjadi di Jakarta, kita dapat memperkirakan apa yang akan terjadi pada kota lain yang tidak memiliki infrastruktur kesehatan sebaik Jakarta (Kusnandar, 2020). Jakarta juga menjadi kota dengan jumlah penderita Covid-19 terbanyak sampai saat ini. Pada saat kami memutuskan DKI Jakarta sebagai lokasi penelitian di bulan Mei 2020, Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah penderita Covid-19 terbanyak dengan 4.546 penderita (https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19). Sampai saat ini (8 September 2021), DKI Jakarta tetap menjadi provinsi dengan jumlah akumulasi kasus tertinggi, yaitu 858.921 atau 20,3% dari jumlah total kasus.

### **Unit Analisis**

Rukun tetangga (RT) menjadi unit analisis penelitian kami. Kami memilih RT karena merupakan wilayah administratif terendah yang menjadi tempat interaksi sehari-hari warga. RT juga kerap menjadi unit administratif terakhir yang dijadikan ujung tombak penerapan kebijakan pemerintah (Alika, 2021). Dengan memilih RT, kami berharap dapat merekam pengalaman keseharian warga menghadapi pandemi, terutama untuk melihat apakah informasi mengenai bantuan untuk warga memenuhi atau tidak memenuhi kebutuhan riil mereka.

Kami memilih sepuluh RT dari sepuluh kelurahan di DKI Jakarta yang mewakili secara seimbang kelurahan di wilayah rawan miskin dan tidak rawan miskin. Kelurahan dipilih berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berjudul Indeks Potensi Kerawanan Sosial Provinsi DKI Jakarta 2019 (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2020). Kami memilih salah satu indikator dari indeks tersebut, yaitu indeks rawan kemiskinan (selanjutnya, IRK) untuk memilih sepuluh kelurahan. Sepuluh kelurahan ini dipilih dengan memperhatikan representasi dari lima wilayah kota pemerintahan di DKI Jakarta: Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Setelah berhasil memilih sepuluh kelurahan, kami meminta rekomendasi dari pejabat di kelurahan mengenai RT yang mencerminkan karakteristik dari IRK di tingkat kelurahan. Dari rekomendasi tersebut, kami mendapatkan sepuluh RT yang menjadi unit analisis kami. Lima kelurahan merupakan kelurahan dengan kategori rawan miskin (Koja, Krendang, Tanah Tinggi, Cipinang Besar Utara, dan Rawajati) sementara lima lainnya berada di kelurahan-kelurahan dengan kategori tidak rawan miskin (Papanggo, tanjung Duren Selatan, Cempaka Putih Barat, Malaka Jaya, dan Tebet Timur).

### **Metode Penelitian**

Dalam mengimplementasikan pendekatan IEA, kami menggunakan lima metode pengambilan data:

### • Riset Pustaka (Desk Research)

Kami melakukan riset pustaka untuk menjelaskan latar belakang dari perputaran arus informasi di Indonesia. Kami menelisik hasil penelitian dan berita yang menjelaskan konteks perputaran arus informasi seperti gambaran lanskap informasi di Indonesia, pengaruh pandemi terhadap krisis akuntabilitas, dan gambaran umum mengenai ekosistem informasi di Indonesia. Hasil dari riset pustaka menjadi bahan untuk penulisan bagian pasokan informasi. Riset pustaka berlangsung pada periode Mei-September 2021.

### Analisis Isi

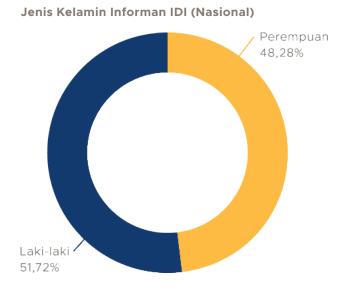
Kami juga melakukan analisis isi terhadap berita-berita media massa pada periode 1 Januari 2021-30 Juni 2021. Kami mengambil berita dari dua stasiun televisi (Metro TV dan tvOne) dan lima media daring (Okezone, Detik, Kompas, Liputan6 dan Kumparan). tvOne, RCTI, dan Metro TV merupakan tiga stasiun televisi paling banyak ditonton (Viva.co.id, 2020). Kami mengeliminasi RCTI karena bukan televisi berita. Sementara itu, lima media daring yang menjadi subjek penelitian ini merupakan portal berita dengan peringkat teratas di indeks Alexa pada 27 September 2021 pukul 15.32 (saat penelitian ini mulai dilakukan). Dengan kata lain, faktor utama pemilihan media dalam penelitian ini adalah luasnya jangkauan dan konsumsi publik terhadapnya.

Dari dua stasiun televisi yang ada, kami memilih sampel utama dan cadangan. Dalam memilih kedua sampel tersebut, kami menggunakan pendekatan constructed week di mana kami memilih dua tanggal yang berbeda di hari yang sama pada periode penelitian analisis isi. Tujuan pemilihan dua tanggal yang berbeda adalah

memastikan setiap hari kalender masuk ke dalam sampel berita dan merepresentasikan tanggal lainnya. Setelah mendapatkan sampel, kami menyeleksi berita yang kami dapat berdasarkan lima variabel: Topik Berita, Narasumber, Sumber Informasi, Daerah Asal Berita, dan Dimensi Berita. Untuk menjaga kualitas kategorisasi berita, kami melakukan uji reliabilitas dengan melihat kesepakatan antara *coder* di lima variabel analisis isi. Hasil uji reliabilitas kami memperlihatkan tingkat kesepakatan di atas 80% untuk seluruh media dan variabel.

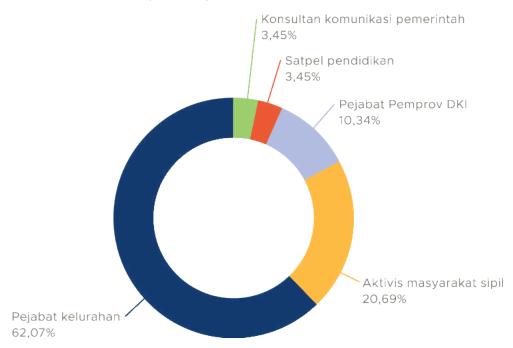
### Wawancara Mendalam (In-Depth Interview/IDI)

Kami melakukan wawancara mendalam di dua tingkat: tingkat nasional dan RT. Kedua wawancara ini berlangsung pada periode Agustus-September 2021. Seluruh wawancara kami lakukan secara daring karena situasi pandemi. Total 29 orang kami wawancarai untuk wawancara mendalam di tingkat nasional.



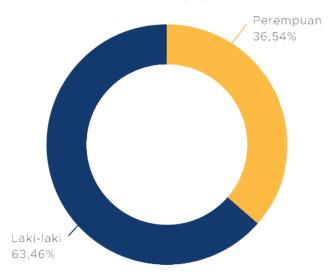
16

### **Jabatan Informan IDI (Nasional)**

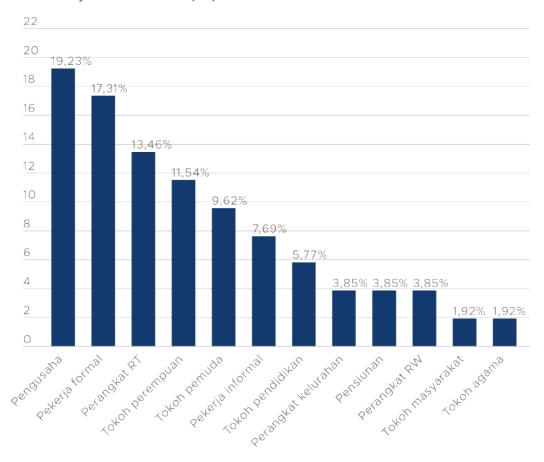


Wawancara mendalam kami lakukan pada Mei-Juli 2021. Kami mencari tokoh masyarakat yang dapat berbicara seputar dinamika arus informasi pandemi, terutama terkait tiga variabel: akses informasi, sumber informasi, pengalaman berbagi informasi. Kami juga mengharapkan tokoh dapat membagikan pengalaman menerima dan mencari informasi di tiga sektor: ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Tokoh-tokoh dipilih agar merepresentasikan kelompok-kelompok penting seperti pemuda, agama, perempuan, bisnis, dan sektor kesehatan. Untuk wawancara mendalam di tingkat RT, kami berhasil mewawancarai 52 orang dengan berbagai latar belakang. Kami mendapatkan informan IDI dari rekomendasi informan lain.

### Jenis Kelamin Informan IDI (RT)



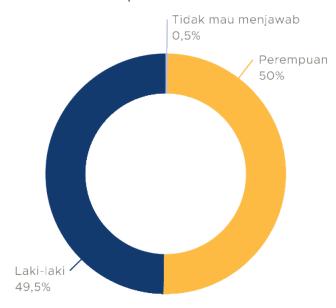
### Jenis Pekerjaan Informan IDI (RT)



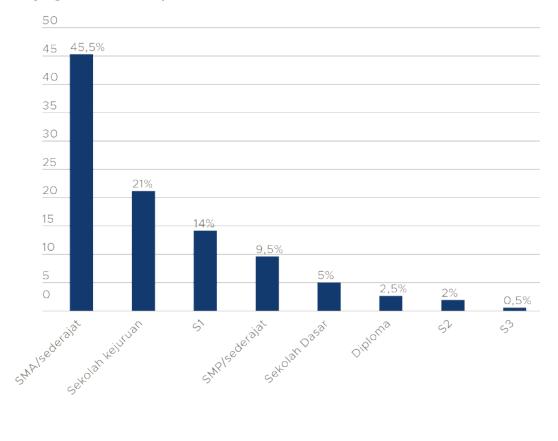
### Survei

Kami melaksanakan survei daring pada Agustus 2021. Kami menargetkan dua ratus responden survei yang terbagi ke dalam sepuluh RT wilayah penelitian. Survei yang kami lakukan termasuk dalam survei tidak acak (non-probability sampling) sehingga hasil survei tidak dapat mencerminkan populasi di tingkat RT di Jakarta. Seluruh survei dilakukan secara daring karena kondisi pandemi.

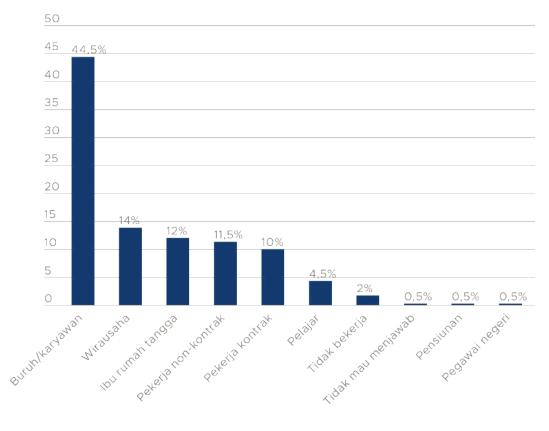
### Jenis Kelamin Responden Survei



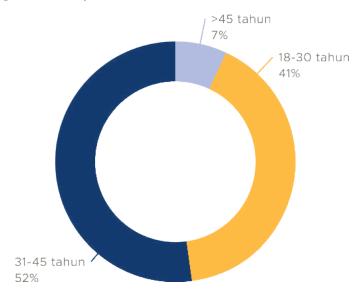
### Jenjang Pendidikan Responden Survei



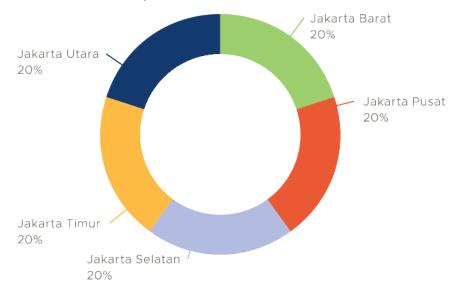
### Jenis Pekerjaan Responden Survei



### Kategori Usia Responden Survei

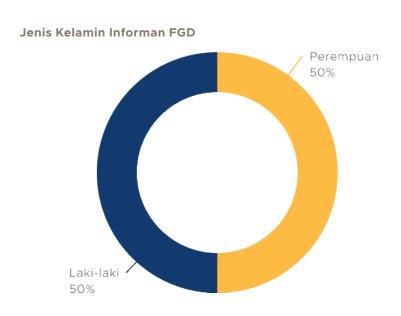


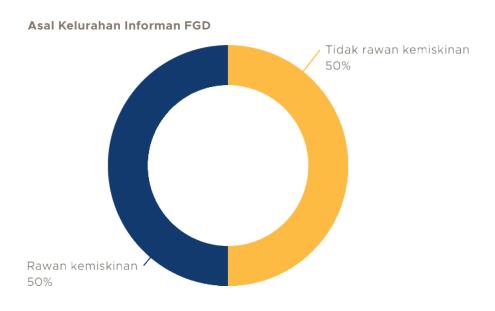
### Daerah Sebaran Responden Survei



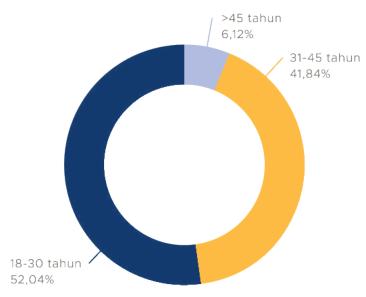
### • Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion/FGD)

Kami melaksanakan diskusi kelompok terarah sebagai metode terakhir penelitian. Diskusi daring berlangsung pada akhir Agustus 2021 dengan fokus pada topik seperti tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta, dan kelurahan. Diskusi kelompok juga menggali pengalaman warga saat menerima bantuan di sektor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Diskusi berlangsung secara daring dengan total peserta 59 orang.

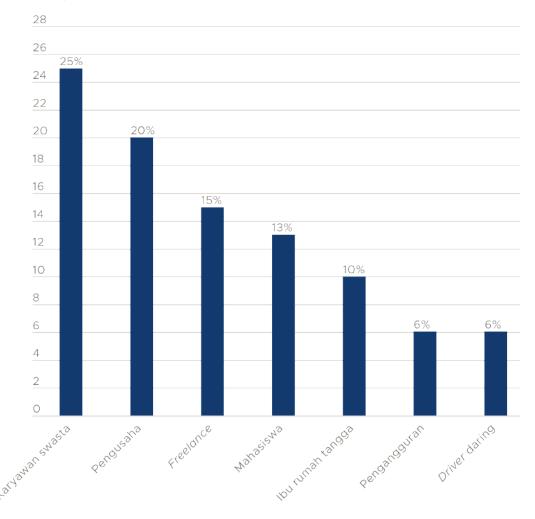




### Kategori Usia Informan FGD



### Jenis Pekerjaan Informan FGD



## **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian kami menghadapi sejumlah kendala. Tiga kendala utama yang kami temui dalam penelitian ini yaitu:

### Bias Pemilihan Kelurahan dan RT

Karena pandemi Covid-19 dan waktu pengurusan izin di kelurahan, kami kesulitan mencari kelurahan yang mengizinkan wilayahnya dijadikan wilayah penelitian kami. Akibatnya, terdapat wilayah-wilayah yang tidak sepenuhnya mencerminkan karakteristik kategori rawan dan tidak rawan miskin. Semakin banyak kami memilih kelurahan dari daftar cadangan kami, karakteristik mereka cenderung semakin bercampur. Contohnya, Kelurahan Kelapa Gading Timur memiliki IRK 4,65 yang berarti wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah dengan IRK terendah. Tapi, karena kesulitan untuk memasuki wilayah tersebut, kami terpaksa memilih Kelurahan Papanggo yang berada di wilayah Jakarta Utara dengan IRK 19,30. Walaupun IRK 19,30 masih termasuk IRK yang cukup rendah, angka ini tidak seekstrem IRK Kelurahan Kelapa Gading Timur.

### Perubahan Tahapan Penelitian karena Pandemi

Setelah mendapatkan 10 RT dari 10 kelurahan di 5 wilayah kota administratif DKI Jakarta, kami menerjunkan peneliti lapangan untuk memulai tahapan wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan survei. Tahapan ini terpaksa berubah pada Juli 2021 akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dimulai

pada 3 Juli 2021. Setelah wawancara mendalam pada Juli 2021, kami harus mendahulukan survei karena ketidakpastian kapan PPKM akan berakhir. Kami khawatir tidak akan sempat melaksanakan survei. Selain itu, diskusi kelompok terarah juga tidak mungkin dilakukan karena pembatasan jumlah orang yang dapat berkumpul. Pada akhir Agustus 2021, kami memutuskan untuk melaksanakan survei terlebih dahulu yang ditutup dengan diskusi kelompok terarah sebagai pengumpulan data terakhir.

### Adaptasi Teknik Penelitian karena Pandemi

Karena pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat, kami terpaksa mengubah pula teknik penelitian dari luring menjadi daring. Kondisi ini turut menghambat penelitian karena tidak semua informan terbiasa dengan interaksi daring. Selain itu, sinyal internet yang kurang baik di wilayah rawan miskin juga terkadang membuat wawancara terhambat karena peneliti lapangan harus mengulang pertanyaan. Peneliti lapangan perlu mengulang pertanyaan-pertanyaan yang kurang terdengar karena sinyal buruk.

### **Analisis Isi**

Analisis isi media yang kami lakukan memiliki keterbatasan terkait periode pemantauan dan instrumen penelitian. Periode pemantauan berita media daring dan televisi sepanjang Januari-Juni 2021 membuat temuan kami bias "periode kesehatan". Semester awal tahun 2021 ditandai oleh maraknya program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah yang dimulai pemerintah pada 13 Januari 2021. Karena gencarnya penerapan program ini, isu kesehatan menjadi lebih dominan daripada isu-isu lain. Lebih jauh, dalam enam bulan tersebut pemerintah berulang kali memberlakukan PPKM seiring fluktuasi jumlah warga yang terjangkit Covid-19. Di luar aspek periode pemantauan, instrumen

riset ini hanya memungkinkan pemantauan topik pemberitaan lewat analisis atas tiga paragraf pertama berita (media daring) dan dalam konteks televisi melalui narasi awal pembaca berita sampai sebelum gambar di roll. Hal ini dilakukan demi menghindari kompleksitas topik yang diangkat dalam berita. Umum diketahui bahwa dalam artikel atau video berita bisa jadi terdapat lebih dari satu topik yang saling bertaut satu sama lain. Karenanya, pilihan untuk melihat topik dari tiga paragraf pertama sekaligus menjadi keterbatasan penelitian ini. Selain itu, instrumen kami juga tidak dirancang untuk melihat bingkai pemberitaan. Pada praktiknya, sebuah berita bertemakan vaksinasi bisa saja dibingkai dalam konteks pemulihan ekonomi nasional. Sebaliknya, dalam contoh yang lain, berita bertemakan anggaran belanja negara bisa saja dibingkai dalam konteks pembiayaan kesehatan. Dalam pengertian ini, pemantauan yang dilakukan memiliki keterbatasan memperlakukan topik sebagai "subjek utama pemberitaan".



Muhammad Soufi Cahya Gemilang/Remotivi

Gang 2B yang berada di RT 007/ RW 005, Kelurahan Tebet Timur.

# Sisi Pasokan Informasi



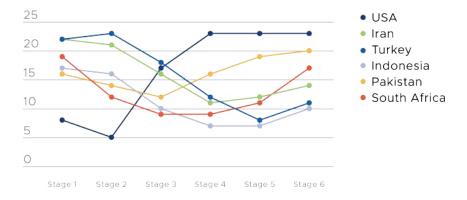
# Sisi Pasokan Informasi

### Lanskap Informasi

### Pandemi dan Krisis Akuntabilitas di Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Pada 2020, penduduk Indonesia berjumlah 270,2 juta jiwa di mana 70,72% di antaranya tergolong usia produktif (15-64 tahun) (Badan Pusat Statistik, 2020). Pulau Jawa, yang luasnya hanya 7% dari wilayah Indonesia, menjadi pulau yang dihuni 56,10% penduduk (Badan Pusat Statistik, 2020). Indonesia tergolong sebagai negara pendapatan menengah bawah (Hamadeh et al., 2021). Sebanyak 10,14% penduduk masuk dalam kategori penduduk miskin (Badan Pusat Statistik, 2021). Selain kemiskinan, korupsi juga masih menjadi persoalan serius di mana Indonesia menempati peringkat ke-102 dari 180 negara di dunia dalam Indeks Persepsi Korupsi 2020 (Transparency International, 2020).

Studi Su et. al. (2021) atas 23 negara dunia menunjukkan bahwa tren efisiensi penanganan pandemi di Indonesia memiliki pola U. Indonesia sempat mengalami peningkatan peringkat efisiensi pada pertengahan pandemi, namun kembali memburuk setelahnya.

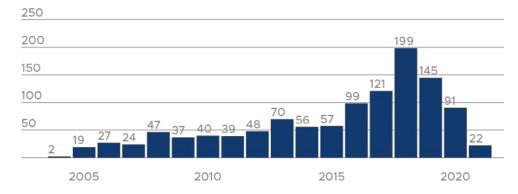


Buruknya penanganan pandemi berhubungan erat dengan buruknya transparansi dan akuntabilitas pejabat serta instansi publik (ICW, 2020). Audit BPK, misalnya, menunjukkan kacaunya manajemen bantuan sosial dalam penanganan pandemi (Tempo, 2021). Akar masalahnya adalah pemerintah tidak berfokus pada langkah-langkah preventif terhadap pandemi. Lebih jauh lagi, BPK juga mendapati banyak insentif dan fasilitas pajak untuk pemulihan ekonomi disalurkan kepada target yang salah. Terdapat pula penyalahgunaan anggaran penanganan pandemi sebesar Rp9 triliun di sepuluh kementerian dan institusi, lebih dari setengahnya terjadi di lingkungan Kementerian Sosial.

Salah satu kasus besar dalam pengelolaan penanganan Covid-19 terungkap pada akhir 2020. Menteri Sosial Juliari Batubara tertangkap karena menerima suap sebesar Rp32,2 miliar untuk pengadaan bantuan sosial selama pandemi. Kerugian negara ditaksir sebesar Rp2 triliun (Mediaindonesia, 2021).

Disahkannya UU KPK pada 2019 dinilai oleh masyarakat sipil sebagai titik balik pelemahan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pengesahan UU tersebut mengawali serentetan kisruh di tubuh KPK, mulai dari pelanggaran etik berat ketua KPK Firli Bahuri sampai kasus tes wawasan kebangsaan yang menjadi dalih pemecatan 59 pegawai KPK. Pelemahan kinerja KPK ini telah terjadi sebelum 2019. Indikasinya, jumlah kasus korupsi yang disidik KPK terus merosot setelah mengalami puncaknya pada 2017 (Statistik KPK, diolah oleh Katadata, 2021).

### Jumlah Penyidikan yang dilakukan KPK



Pada semester pertama 2021, KPK hanya menindak 19% dari targetnya (ICW, 2021). Sepanjang semester ini pun, KPK hanya menindak lima kasus penyalahgunaan anggaran penanggulangan Covid-19. Pemantauan ICW (2020) sepanjang 2020 menemukan 194 dugaan penyalahgunaan bantuan sosial terkait pandemi. Sebagian besar penyalahgunaan terkait pungutan liar (46 aduan), *inclusion error* (43 aduan), dan bantuan tak diterima warga (23 aduan). Jenis bansos yang paling banyak diadukan adalah bansos Pemprov (36 aduan) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (34 aduan). ICW juga menerima 45 aduan warga terkait bantuan sosial di luar penyalahgunaan, seperti keluhan bahwa bansos tidak membantu, kelompok terdampak tidak mendapat bantuan, atau pertanyaan umum terkait bansos.

### Selayang Pandang Ekosistem Media Indonesia

Jatuhnya rezim otoriter dan militeristik Orde Baru pada 1998 mendorong reformasi di berbagai sektor. Salah satu agenda utama dari Reformasi adalah akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik. Industri pers adalah salah satu sektor yang mengalami perubahan dramatis setelah dicabutnya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan disahkannya UU Pers Tahun 1999. Situasi ini memungkinkan bisnis pers dijalankan oleh pengusaha di luar lingkaran Orde Baru dan siapa pun bisa menjadi wartawan tanpa wajib menjadi anggota Persatuan Wartawan Indonesia (organisasi profesi wartawan satu-satunya yang direstui Orde Baru). Tak pelak, ribuan media baru terbit pada masa awal perubahan ini.

Antara 2014-2016, Dewan Pers (dalam Prasetyo, 2017, h. 14) memperkirakan ada sekitar 47 ribu media di Indonesia. Sebanyak 43 ribu di antaranya merupakan media daring dan 2-3 ribu lainnya media cetak. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 168 media daring dan 321 media cetak yang lolos verifikasi Dewan Pers sebagai media profesional. Pada 2015, Dewan Pers mencatat terdapat 674 stasiun radio dan 523 stasiun televisi di seluruh Indonesia.

Pada 2008, UU Keterbukaan Informasi Publik disahkan dan Komisi Informasi Publik berdiri. Komisi ini dibentuk untuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik. Semangat akuntabilitas publik yang dibawa reformasi ini telah berjalan 23 tahun. Sebagaimana sektor HAM (Voaindonesia, 2015), militer (Imparsial, 2019), atau pemberantasan korupsi (ICW, 2010), sektor hak informasi dan ekspresi publik tengah mengalami stagnasi. Di sektor industri media, kemandekan reformasi terjadi di segala *platform* dengan tantangan unik di tiap *platform*nya.

Televisi adalah medium yang penetrasinya mencapai 96% pada 2017 (Nielsen, 2017). Dominasi ini juga berpengaruh pada pendapatan iklan: televisi menguasai 85% kue iklan pada 2019 (Nielsen, 2019). Saat ini, industri televisi di Indonesia dikuasai hanya oleh segelintir perusahaan besar yang kesemuanya berada di Jakarta. Selain sejatinya melanggar UU Penyiaran yang mengamanatkan siaran berjaringan (Sistem Stasiun Jaringan), sentralisasi ini juga menyebabkan ketimpangan antara pelaku industri penyiaran di Jakarta dan luar Jakarta.



Muhammad Fawwaz Rifasya/Remotivi

Salah satu sudut perumahan di RT 005/RW 002, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat.

TVRI adalah satu-satunya stasiun TV publik di Indonesia. Status TVRI sebagai TV publik ditetapkan sejak lahirnya UU Penyiaran pada 2002. Selama beberapa dekade sebelumnya, TVRI dikontrol oleh pemerintah dan menjadi alat propaganda. Hingga hari ini, TVRI belum berhasil menjalankan perannya sebagai TV publik secara ideal dan kerap didera konflik internal yang sarat kepentingan politik praktis.

Meski televisi adalah media dengan penetrasi tertinggi, dalam konteks berita, media digital (termasuk media sosial) menjadi sumber utama yang dirujuk publik (Newman et al., 2021, h. 137). Dalam konteks ini, Detik.com, Kompas.com, dan CNNIndonesia.com menjadi medium yang paling marak diakses (Newman et al., 2021, h. 137). Situs berita secara konsisten mendominasi situs dengan *traffic* tertinggi di Indonesia. Pada 20 September 2021 misalnya, 7 dari 10 situs paling banyak diakses di Indonesia adalah situs berita (Alexa.com, 20 September 2021). Namun, produk jurnalisme digital sering dinilai bermasalah, mulai dari perkara akurasi, sensasionalisme, dan diskriminasi (Remotivi, 2019; Remotivi, 2021).



Muhammad Soufi Cahya Gemilang/Remotivi

Salah satu sudut Kompleks Rumah Susun (Rusun) Klender di Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur. Sebelum pandemi Covid-19, media cetak sudah menghadapi tantangan ekonomi yang serius. Situasi ini membuat banyak media menempuh beberapa strategi, mulai dari mengurangi jumlah halaman dan hari terbit, beralih ke medium digital, pemecatan massal, atau berhenti terbit selamanya. Mengutip data dari Nielsen, Aliansi Jurnalis Independen mencatat ada 16 surat kabar dan 38 majalah gulung tikar pada 2015 (Yuganto, 2015). Meski terjadi peralihan drastis pola konsumsi pembaca berita dari cetak menjadi digital, media cetak masih bertahan dengan penetrasi sebesar 8% karena adanya faktor kepercayaan pembaca pada informasi di media cetak (Nielsen, 2017).

Selain industri, Indonesia pun mengalami stagnasi dalam pemenuhan kebebasan pers dan ekspresi. Meski mengalami peningkatan peringkat dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia dari peringkat 119 pada 2020 menjadi 113 pada 2021 (Reporters Without Borders, 2021), kebebasan pers di Indonesia masih dalam kategori merah atau buruk. Selain karena kepemilikan media yang terkonsentrasi dalam delapan korporasi raksasa (Tapsell, 2017), peringkat tersebut juga disebabkan oleh beberapa faktor lain seperti kasus kekerasan terhadap jurnalis, buramnya informasi dari dan di Papua Barat, hingga adanya sejumlah pasal karet dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang bisa mengirim orang ke penjara karena tudingan pencemaran nama baik.

Amnesty International Indonesia mencatat bahwa pada 2020 sendiri terdapat 119 kasus terkait UU ITE dengan total 141 tersangka, termasuk 14 aktivis dan 4 jurnalis. LBH Pers pun mencatat 117 kasus kekerasan terhadap Jurnalis selama 2020 (katadata.co.id). Selain itu, beberapa tahun terakhir ini juga terjadi tren manipulasi informasi menggunakan buzzer dan cyber troops, termasuk pembungkaman kritik di ranah digital dengan modus pembajakan akun media sosial, pemblokiran situs, pemadaman internet, dan doxxing. SAFEnet (2020) menilai kebebasan digital di Indonesia berada di bawah ancaman otoritarianisme.

# Kebijakan Komunikasi Pandemi

Pemerintah Indonesia telah menelurkan sederet kebijakan untuk mengatasi pandemi Covid-19. Penelitian ini mengkaji sejumlah kebijakan serta penerapannya yang berdampak pada penanganan pandemi secara umum serta diseminasi informasi secara khusus. Temuan utama atas kajian produk dan implementasi kebijakan ini dapat dibagi menjadi tiga: prioritas pemulihan ekonomi, kontrol informasi dan ekspresi, dan lemahnya koordinasi.

### **Prioritas Pemulihan Ekonomi**

Terdapat dua kebijakan yang perlu kita lihat untuk memahami prioritas pemerintah dalam menangani pandemi. Kebijakan pertama adalah Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 yang muncul pada Maret 2020. Melalui kebijakan ini, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 (selanjutnya Gugus Tugas) dibentuk. Produk kebijakan kedua adalah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 yang muncul empat bulan setelahnya yakni Juli 2020. Melalui keputusan ini, dibentuklah Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang menaungi Gugus Tugas.

Gugus Tugas, yang pertama kali dibentuk, berorientasi mengatasi pandemi dan melihat pandemi sebagai isu kesehatan. Meskipun pemerintah terkesan tidak serius dalam menangani virus Covid-19 sejak kemunculannya (Safitri, 2021), struktur Gugus Tugas menegaskan kalau institusi tersebut dikendalikan oleh institusi-institusi yang berorientasi terhadap keteraturan dan penanganan pandemi. Selain Kementerian Kesehatan sebagai pengarah, pelaksana Gugus Tugas diberikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Dengan dileburnya Gugus Tugas di bawah Komite pada Juli 2020, prioritas ini bergeser. Selain Gugus Tugas, KPCPEN juga membawahi Komite Kebijakan dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (selanjutnya, Satgas Ekonomi). Gugus Tugas pun beralih nama menjadi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (selanjutnya, Satgas Covid-19). Fokus penanganan pandemi berubah dari aspek kesehatan menjadi pemulihan ekonomi. Hal ini terlihat, misalnya, dengan dipilihnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai pemimpin Komite Kebijakan yang berwenang memberi rekomendasi kepada presiden terkait pandemi.

Peraturan-peraturan komunikasi publik pemerintah pusat pun mencerminkan hal ini. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 413 Tahun 2020, misalnya, mengatur mengenai pedoman komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat (KRPM). Pedoman tersebut mengadopsi Risk Communication and Community Engagement Readiness and Response to Coronavirus Disease (Covid-19) yang dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO). Menariknya, KRPM menambahkan satu aktor kunci yang tidak terdapat dalam pedoman WHO yakni pengusaha dan "mitra swasta". Untuk daerah yang memiliki eskalasi kasus, KRPM menekankan agar "roda perekonomian tetap dapat berjalan, maka perlu dilakukan mitigasi dampak pandemi Covid-19".

Di luar KRPM, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 juga mencerminkan prioritas ekonomi pemerintah. Aturan tersebut menyebutkan bahwa pemerintah daerah diinstruksikan untuk melakukan realokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas "penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup". Penanganan dampak ekonomi ini terutama berbentuk pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok; insentif pengurangan atau pembebasan pajak daerah, serta perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir; pemberian stimulus kepada UMKM; dan penanganan dampak ekonomi lainnya.

Pergeseran ini memicu protes publik. Dalam survei Lembaga Survei Indonesia pada September 2020, 60,5% responden yang merepresentasikan warga Indonesia berpendapat kesehatan harus menjadi prioritas utama pemerintah alih-alih ekonomi (36%) (Media Indonesia, 2020). Selain itu, pelibatan aktor-aktor swasta dalam penanggulangan pandemi memunculkan dugaan bahwa aktor-aktor bersangkutan menggunakan pandemi untuk mengambil keuntungan. Pandangan barusan diperkuat pendapat seorang aktivis masyarakat sipil yang melihat pandemi hanya menjadi alat mengeruk keuntungan. Ia mengatakan:

Menteri kesehatan kita ini orang BUMN. Dia membawa stafsus (staf khusus) banyak sekali orang BUMN, sehingga jelas... Itu benar-benar mencerminkan bahwa dia sebenarnya adalah representasi dari kepentingan ekonomi-politik untuk mengambil keuntungan dari pandemi melalui institusi resmi yang seharusnya menjadi institusi yang respectful, terpercaya. (Aktivis masyarakat sipil, perempuan)

### Kontrol Informasi dan Ekspresi

Selain isu ekonomi, stabilitas sosial juga menjadi prioritas pemerintah dan dalam beberapa kasus, mengorbankan transparansi dan akuntabilitas. Mekanisme kunci untuk mendukung stabilitas sosial ini adalah dengan meredam informasi yang berpotensi menimbulkan kontroversi atau meresahkan publik. Hal ini dilakukan dengan dua cara: membatasi informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan membatasi cara media meliput pandemi.

Hal pertama dilakukan lewat sejumlah produk kebijakan, misalnya, melalui cara KRPM mengadopsi pedoman WHO. Pedoman WHO menyebutkan perlunya "mengkomunikasikan apa yang sudah dan belum diketahui: jelaskan sejauh mana adanya ketidakpastian" (World Health Organization, 2020). Formulasi ini diadopsi menjadi ketentuan

bahwa pemerintah "mengkomunikasikan informasi yang boleh dan tidak boleh diketahui oleh publik dengan menjelaskan sampai sejauh mana ketidakpastian yang terjadi". Perbedaan ini menekankan bahwa pemerintah memiliki hak untuk menyimpan informasi yang tidak boleh diketahui oleh publik. Hak pemerintah berbeda dengan prinsip yang dianut oleh WHO yakni agar pemegang otoritas selalu transparan terkait pandemi demi menghindari kebingungan di masyarakat.

Selain kontrol informasi, terdapat pula produk kebijakan yang mengatur bagaimana komunikasi publik pemerintah. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 199 Tahun 2020 tentang Komunikasi Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Di dalam Surat Edaran tersebut, pemerintah dengan tegas menyatakan agar komunikasi publik pemerintah menghindari penggunaan kata-kata seperti "genting", "krisis", dan "sejenisnya".

Tindakan serupa juga terjadi dalam upaya pemerintah mengontrol peliputan seputar pandemi. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2020 dibuat sebagai pedoman komunikasi kebiasaan baru akibat pandemi Covid-19, yang ditujukan bagi berbagai aktor informasi, termasuk pejabat negara, jurnalis, dan pemangku kepentingan lain. Pedoman tersebut mengimbau agar jurnalis "menghindari penggunaan kata sifat yang bisa menambah kecemasan masyarakat." Jurnalis juga perlu untuk "menghindari publikasi konten yang memicu kepanikan publik." Latar seleksi informasi ini dipertegas oleh petikan wawancara dengan seorang konsultan komunikasi pemerintah:

Kan nanti kita yang kita akan mengemas pesan apa yang pas disampaikan ke publik, yang bisa mendukung transparansi datanya pemerintah, tapi juga enggak bikin publik gaduh gitulah, enggak bikin publik heboh gitu. Jadi kan ada beberapa hal yang penting kita share ke publik, tapi ada beberapa hal juga yang enggak terlalu urgent *untuk diketahui publik. ... Transparan itu bukan berarti telanjang kan.* (Konsultan komunikasi pemerintah, laki-laki).

Wewenang pemerintah untuk mengategorikan informasi yang tidak boleh diketahui publik ini kontradiktif dengan prinsip komunikasi publik pemerintah dalam Keputusan Menteri Kesehatan yang mengimbau pemerintah "[s]egera memberikan informasi terbaru secara terbuka, meskipun tidak lengkap untuk menjelaskan situasi yang terjadi (mengelola ketidakpastian), menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses publik untuk mendapatkan informasi terbaru (misalnya hotline, situs resmi, media sosial resmi, dan lain-lain)" (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 413 Tahun 2020, 146).

Prinsip-prinsip yang bertentangan ini memunculkan berbagai kritik dari masyarakat yang menuduh pemerintah tidak transparan terkait informasi-informasi penting pandemi. Sebagai contoh, di masa pandemi, masyarakat kerap mengkritik pemerintah yang cenderung tertutup mengenai informasi hasil tes, *tracing*, dan angka kematian penderita Covid-19 kepada publik (Rojani, 2020). Seorang aktivis dari masyarakat sipil menguatkan kritik tersebut:

Kalau yang rutin itu kan paling cuma apa, angka kasus konfirmasi, kesembuhan, sama kematian gitu. Enggak ada tracing. Sampai sekarang juga sebenarnya tracing masih belum bagus-bagus bangetlah datanya. Terus enggak ada tentang testing gitu. Nah, itu ada dan itu enggak pernah dikomunikasikan. (Aktivis masyarakat sipil, perempuan)

Selain itu, pemerintah juga ingin tetap memiliki kredibilitas tinggi di mata masyarakat dengan menekan angka kematian. Karena itu, sebisa mungkin angka kematian dibuat tidak terlalu tinggi. Mengenai transparansi data penderita dan korban kematian akibat Covid-19, seorang aktivis masyarakat sipil menceritakan:

Mereka memang tidak mau. ... Mereka ingin daerahnya terlihat bagus saja, jadi tidak ada kasus, terus kematian tidak banyak, terus ya itu, akibatnya ditutup-tutupi. Kayak mereka itu yang dikendalikan data, bukan pandemi. Itu bukan hanya bagaimana apa yang dibuka dan tidak dibuka di situs resmi pemerintah atau kanal resmi publikasi Covid pemerintah... Nah. kadana-kadana mereka dapat WA dari atasan kalau ada orang mau tes di puskesmas mulai minggu ini dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, ada pembatasan jumlah testing. Tetapi pas yankes (pelayanan kesehatan), tetap harus kalau ada orang yang tes tidak boleh ditolak harus tetap dilayani, tapi apakah spesimennya itu dihitung atau tidak, dites di laboratorium pada periode itu atau enggak, itu karena tak ada testing. Ya sudah, dikirim saja terus disimpan kali ya buat dites tanggal berikutnya ketika sudah dibuka tesnya. (Aktivis masyarakat sipil, perempuan)

### Lemahnya Koordinasi

Dalam penanganan pandemi, masing-masing institusi pemerintah memilikiagenda sendiri, sehingga sulituntuk dilihat sebagai satukesatuan yang solid. Mereka akan berupaya terlihat sebagai sekumpulan aktor yang kompak dan mewakili satu kepentingan, tapi hal yang sebaliknya justru terjadi dalam penanganan pandemi. Misalnya, Satugas Covid-19 dan Komite Kebijakan bersama Satgas Ekonomi memiliki dua prioritas yang berbeda dan tidak selalu sejalan yakni kesehatan dan ekonomi. Perbedaan kepentingan antarinstitusi ini juga mengemuka dalam wawancara kami dengan seorang konsultan komunikasi pemerintah pusat. Ia mengatakan:

Kementerian Kesehatan punya ini [kepentingan] sendiri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan punya [kepentingan] sendiri. Nah, terus yang berusaha ngejahit itu yang KPCPEN (Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional), yang komunikasi publik KPCPEN. ... Tapi, juga ngejahitnya sektoral, kalau yang kesehatan dia ngejahit ke sama Kemenkes, kalau untuk pendidikan dia ngejahit sama Kemendikbud, untuk Bansos dia menjahit sama Kemensos. (Konsultan komunikasi pemerintah, laki-laki)

Bukan hanya di tataran antarinstansi, perbenturan juga terjadi antara aturan nasional dengan aturan lokal dan menyulitkan implementasi kebijakan di lapangan. Hal ini, misalnya, nampak dari pernyataan pejabat kelurahan di Krendang, Jakarta Barat:

Antara Kemendagri dan Pergub itu berbeda. Jam 8 itu sudah harus tutup. Kemendagri jam 8 tutup, terus boleh masih buka 24 jam tapi takeaway. Tapi, di Pergub jam 8 harus tutup. Jadi, kita di wilayah kan agak rancu ini, Pak. Sedangkan, di wilayah warga banyak yang usaha dan tidak terima, pasti ada lah perlawanan-perlawanan sedikit dari mereka. Cuma ya kita alhamdulillahnya karena humanis mengasihtahunya, tidak ada kendala sedikit pun. Mungkin mereka masih menerima itu, "Oh, iya tak apa, Pak. Tapi, takeaway masih bisa kan, Pak?" Dan kita mau tak mau mengambil pilihan yang Kemendagrinya, ya sudah kalau memang itu peraturannya. (Pejabat Kelurahan Krendang, laki-laki)

### Solusi Digital yang Terfragmentasi

Sejak awal pandemi berkembang di Indonesia, pemerintah telah mengembangkan berbagai *platform* digital untuk membantu penanganan Covid-19. Pada Maret 2020, KCPEN meluncurkan covid19. go.id, situs resmi pemerintah yang diproyeksikan menjadi sumber informasi resmi satu pintu mengenai Covid-19. Selain situs nasional, setiap provinsi dan kabupaten/kota juga memiliki situs resmi mereka sendiri (daftar situs dapat dilihat di kawalcovid19.id). Namun, sistem informasi berbasis situs ini masih jauh dari baik.

Penelitian Farizi dan Harmawan (2020) atas situs resmi pemerintah menemukan tiga permasalahan utama dalam buruknya sistem informasi pemerintah selama pandemi: 1) inkonsistensi informasi, 2) minimnya transparansi data, dan 3) data yang tidak tersinkronisasi dengan baik sehingga memunculkan kesimpangsiuran. Proses perbaikan sistem manajemen data Covid-19, yang dilakukan sejak November 2020, berjalan lambat. Hingga Agustus 2021, baru Jawa Tengah yang terintegrasi dengan data dari Pusdatin pusat (jatengprov.go.id, 2021). Dampaknya, sering terjadi perbedaan data Covid-19 antara pusat dan daerah.

Situs resmi pemerintah daerah pun memiliki masalahnya tersendiri, terutama dalam fitur yang berbeda-beda. Situs resmi Pemprov DKI Jakarta (corona.jakarta.go.id), misalnya, memiliki fitur yang lebih beragam. Selain data statistik Covid-19 di Jakarta, situs ini juga memiliki fitur pengecekan penerima bantuan sosial serta pendaftaran vaksin. Situs ini pun terhubung dengan *platform* aplikasi Jakarta Kini (JAKI), *platform* pengelolaan kota digital yang dikembangkan Pemprov DKI Jakarta. Sementara itu, situs Jawa Tengah (corona.jatengprov.go.id) hanya memiliki daftar informasi dan tidak memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan secara daring.

Selain situs web, pemerintah juga mengembangkan sejumlah aplikasi digital terkait Covid-19. Di samping PeduliLindungi yang dikembangkan Kemkominfo dan diluncurkan pada Agustus 2021, terdapat pula aplikasi 10 Rumah Aman yang dikembangkan Kantor Staf Presiden, Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) yang dikembangkan oleh KCPEN, dan SIRANAP RS yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan.

Pemerintah daerah pun tak ketinggalan. Pemprov Jawa Barat mengembangkan PIKOBAR, DI Yogyakarta mengembangkan Cared+, Pemprov Sulawesi Barat membuat PaPa Sulbar, Kabupaten Bandung mengembangkan Sawarna, dan Kota Bandung mengembangkan PUSICOV. DKI Jakarta mengambil langkah yang berbeda, yakni dengan mengintegrasikan pelayanan seputar Covid-19 dengan *platform* digital yang sudah ia miliki sebelumnya, Jakarta Kini (JAKI).

Pengembangan *e-governance* melalui teknologi digital ini mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government (2003). Meski adopsi teknologi digital punya potensi besar dalam peningkatan pelayanan publik, maraknya tren membuat aplikasi seputar Covid-19 ini tampak tak dibarengi dengan koordinasi yang baik. Beberapa aplikasi ini memiliki fitur yang serupa, sehingga berpotensi terjadi tumpang tindih. Misalnya, fitur Jogja Pass dalam aplikasi Cared+ milik Pemerintah DI Yogyakarta merupakan fitur *tracking and tracing* yang serupa dengan PeduliLindungi. Aplikasi 10 Rumah Aman, BLC, dan Cared+ sama-sama berfungsi sebagai aplikasi *self-screening*, yang juga memberi data umum seputar kondisi Covid-19. Sawarna Kabupaten Bandung dan PUSICOV Kota Bandung memiliki fitur serupa yakni menyajikan statistik informasi mengenai Covid-19 di daerah masing-masing.

Selain situs web dan *mobile apps*, pemerintah juga menggunakan *platform* media sosial sebagai kanal informasi dan komunikasi seputar pandemi. Sebagaimana dua *platform* yang sudah disebutkan di muka, terdapat berbagai akun resmi pemerintah terkait Covid-19. Di Instagram

saja, terdapat @lawancovid19\_id, @satgasperubahanperilaku, dan @mulaidarikamu\_id yang merupakan produk kampanye dari KCPEN dan Kemenkominfo. Setiap akun ini memiliki konten dan informasi yang serupa.

# Arus Informasi Seputar Pandemi di Jakarta

Diseminasi informasi oleh Pemprov DKI Jakarta mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Orientasi terhadap stabilitas dan kredibilitas pemerintah juga diadopsi oleh Pemprov DKI Jakarta dalam menyebarkan informasi seputar pandemi. Dalam melakukan komunikasi publik, Pemprov DKI Jakarta melakukan pemantauan media sosial yang menuntun strategi komunikasi dan pengemasan pesan. Hal ini diungkap oleh seorang pejabat Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Pemprov DKI Jakarta:

Jadi, ada tim analisis, nanti insert isu-isu yang dikumpulkan. Itu biasanya kita feeding ke pimpinan gitu. Nanti selanjutnya berdasarkan analisa apakah dia tonenya memang positif, negatif dan lain-lain. Dari pimpinan kemudian akhirnya akan ada satu kebijakan kira-kira informasi apa yang akan kita sampaikan, termasuk mungkin model-model komunikasinya atau strategi komunikasinya, apakah memang bisa kita sampaikan cukup dengan infografis atau mungkin kita keluarkan siaran pers. (Pejabat Diskominfotik, laki-laki)

Dalam pembuatan informasi, Diskominfotik melakukan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Konsultasi ini melibatkan proses seperti verifikasi dan validasi informasi yang didapat sebagai bahan baku produk-produk komunikasi publik. Produk-produk ini nantinya disebar lewat kanal-kanal seperti media massa, webinar, atau media sosial. Selain menggunakan kanal media konvensional dan sosial, Pemprov DKI Jakarta juga mengandalkan aplikasi pesan yang menjangkau RW dan RT terutama WhatsApp.

Ada jaringan WhatsApp yang seperti saya sampaikan tadi melalui RT-RW ya, yang dikelola oleh Biro Pemerintahan. Nah, Biro Pemerintahan ini menjadi koordinator pemerintah wilayah dalam hal kita memanfaatkan grup WA-nya mereka untuk penyampaian atau penyebarluasan informasi yang sudah kita buat. (Pejabat Diskominfotik, laki-laki)

Meskipun Pemprov DKI Jakarta menggunakan bermacam kanal komunikasi untuk menjangkau masyarakat, mereka juga menyadari terdapat kemungkinan informasi tidak sampai ke tingkat RW dan RT. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta membuat informasi dalam bentuk, misalnya, infografis. Infografis kemudian diberikan kepada perangkat RW dan RT untuk dibagikan kepada warga. Pemprov DKI Jakarta menganggap informasi jenis ini akan lebih mudah dipahami oleh warga.

Terus pertanyaannya, apakah seluruh masyarakat di Jakarta ini bisa melihat, apa, internet dan lain sebagainya? Tidak semua, ya. Masyarakat yang di pinggiran, yang tidak—katakanlah—belum melek IT, dia cuma bisa telepon. Memakai SMS juga enggak ngerti. Nah, itu kita punya infografis tadi dan kita sarankan kepada perangkat wilayah seperti RT/RW melalui kelurahan untuk mencetak sendiri informasi-informasi infografis tadi untuk disebarkan kepada masyarakat. Kalau mencetak banyak mungkin susah. Mungkin dari kelurahan itu biasanya memberi satu kepada RW-nya, RW-nya yang nyebar ke tingkat-tingkat RT. (Pejabat Diskominfotik, laki-laki)

Pemprov DKI Jakarta juga melakukan evaluasi komunikasi dengan meminta bukti-bukti sampainya informasi ke masyarakat di tingkat RW dan RT. Salah satu caranya adalah dengan meminta bukti dari Biro Pemerintahan mengenai sejauh mana informasi tersebar dan dipahami oleh masyarakat.

Jadi gini, kita tidak hanya memberikan ke Biro Pemerintahan, "Tolong sebarluaskan ini". Tidak hanya sebatas itu. Kita pertanyakan bukti sudah tersebarluaskan itu mana. Kenapa? Kita juga harus memberikan bukti ini kepada pimpinan, dalam hal ini Pak Gubernur, benar enggak informasinya ini sampai ke masyarakat. Kemudian informasi yang disampaikan kepada masyarakat oleh masyarakat itu dipahami, dimengerti enggak? Nah, cara melihat dimengerti atau tidaknya itu dari respon dan tindakan mereka yang tadinya tidak memahami, tidak mengetahui. Orang tadi yang enggak mau vaksin, akhirnya mau vaksin. Artinya, pesannya sampai dong. Kan mereka paham. (Pejabat Diskominfotik, laki-laki)



Muhammad Soufi Cahya Gemilang/Remotivi

Gang utama yang menuju ke RT 007/RW 005, Cipinang Besar Utara. Berada sedikit jauh dari jalan utama Cipinang Besar Utara, gang-gang kecil yang hanya dapat dilewati dua motor ini adalah akses utama yang menghubungkan permukiman padat ini dengan RT lainnya.

# Kendala di Lapangan

Kelurahan menjalankan peranan penting untuk melaksanakan dan mengawasi kebijakan terkait pandemi. Saat menerima informasi dari Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta, mereka mengaku tidak mengalami kesulitan memahami apa yang harus mereka lakukan. Strategi menjangkau warga dengan jaringan grup WhatsApp bersama RW dan RT pun dinilai efektif dalam penyampaian informasi.

Kami memetakan setidaknya tiga kendala yang dialami kelurahan dalam menjalankan tugasnya terkait penanganan pandemi. Pertama, kelurahan mengeluhkan kebiasaan-kebiasaan warga yang tidak taat protokol kesehatan. Hal ini terjadi baik di daerah rawan miskin ataupun tidak rawan miskin.

Masyarakat itu kadang-kadang masih ada lepas masker, bilang dia sumpek lah, ada kesulitan lah, apa lah. Itu satu. Kedua, bilangnya dia lagi makan lah kalau keponggok pas kita turun [lapangan]. Kalau untuk menerapkan sih kita selalu karena ada sektor terkait, Satpol PP, Dishub. Kita selalu mengadakan [patroli] siang-malam, ada penertiban. (Pejabat Kelurahan Tanah Tinggi, perempuan)

Begini, Pak. Ini kan pengurus masjid bilang, ini ibadah juga tidak melampaui batas dan dilaksanakan dengan prokes. Ada cek suhu, cuci tangan, dan juga dilakukan tidak banyak, ada jaga jarak. Walaupun sudah dihimbau ditutup, tetap saja jamaah ada saja yang datang melaksanakan sholat di situ. (Pejabat Kelurahan Krendang, laki-laki)

Kedua, pihak kelurahan juga harus menghadapi persoalan minimnya sumber daya yang mereka miliki. Hal ini disebabkan oleh banyaknya tugas yang mesti diselesaikan, waktu yang singkat, serta kebijakan bekerja dari rumah (WFH) yang membuat kelurahan tidak bisa

beroperasi dengan kapasitas penuh. Hal ini, misalnya, disampaikan oleh salah seorang pejabat Kelurahan Krendang:

Ya, memang instruksi ini bertubi-tubi turunnya. Pertama, dari SDM Kelurahan sendiri, karena adanya aturan kebijakan WFH inilah yang membuat saya ini agak sedikit kewalahan dengan bebannya. Kegiatan itu tidak berkurang tetapi SDM kita dikurangi dengan adanya WFH. Personil kami ada sembilan orang, dibagi dua. Inilah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi untuk terjun langsung ke lapangan memberikan himbauan-himbauan dari Gubernur atau Sekda untuk masyarakat saya. Jadi, memang dari pihak kita sendiri ada kelemahan di bidang SDM karena adanya WFH. Ini kan menjadikan kita tidak maksimal untuk bekerja secara utuh. (Pejabat Kelurahan Krendang, laki-laki)

Selain kekurangan personel, jumlah bantuan juga menjadi kendala tersendiri, terutama di kelurahan wilayah rawan miskin. Pejabat kelurahan menilai jumlah bantuan tidak sesuai dengan jumlah warga yang membutuhkan. Kelurahan terkadang harus membagi bantuan untuk warga. Hal ini, misalnya, diutarakan oleh pejabat dari pihak Kelurahan Koja:

Ya, terima. Memang ada yang nggak terima, "Kok begitu? Kan itu jatah nama saya!" Ya, sekarang gini aja deh, itu kan bantuan dari pemerintah. Nah, istilahnya ada warga yang nggak kebagian, daripada nanti saling ribut, saling—pokoknya saling ributlah, Pak, kita istilahnya diikhlaskan untuk yang tidak dapat sembako. Jadi kita pemerataan. (Pejabat Kelurahan Koja, perempuan)

# Agenda *Setting* Media: Dominasi Jakarta dan Isu Kesehatan

Hasil analisis kami terhadap 445 berita media daring dan 180 berita televisi, isu kesehatan menjadi agenda utama media selama semester pertama tahun 2021. Secara umum, isu kesehatan yang mencakup vaksinasi, BPJS Kesehatan, dan infrastruktur kesehatan diberitakan oleh lima media daring sebanyak 191 kali, sedangkan televisi sebanyak 125 kali.

Pemberitaan vaksinasi menjadi yang paling mendominasi kedua platform tersebut. Berita vaksinasi muncul sebanyak 90 kali dalam tayangan televisi dan 116 kali dalam pemberitaan media daring. Pemberitaan vaksinasi di televisi umumnya membahas kegiatan vaksinasi yang melibatkan pejabat pemerintah, termasuk institusi Polri dan TNI. Selain kegiatan vaksinasi, berita televisi juga membahas kebijakan pemerintah terkait jenis vaksin yang digunakan, target capaian vaksin, hingga sanksi bagi penolak vaksin.

Pemberitaan vaksinasi di media daring juga hampir serupa dengan berita di televisi yang membahas kegiatan vaksin hingga kebijakan pemerintah. Akan tetapi, pemberitaan media daring menghadirkan narasumber yang lebih beragam dan banyak melibatkan pejabat di tingkat lokal.

Dominannya topik vaksin dalam temuan kami tak lepas dari periode pengambilan data penelitian ini yakni antara Januari hingga juni 2021. Awal Januari 2021 adalah momentum dimulainya program vaksinasi pemerintah (13 Januari 2021). Sejak saat itu, pemberitaan mengenai keamanan vaksinasi, akses pada vaksin, hingga upaya-upaya pemerintah memastikan ketersediaan vaksin mendominasi ruang publik. Terlebih sejak 11 Januari hingga Juli 2021, pemerintah menerapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di berbagai wilayah di Indonesia. Puncaknya terjadi pada 3 Juli hingga 25 Juli 2021, ketika

PPKM Darurat yang menerapkan peraturan ketat pembatasan sosial diberlakukan di sebagian besar wilayah Indonesia akibat melonjaknya penyebaran virus Covid-19 pascalebaran. Per 26 Juli 2021, pemerintah melonggarkan PPKM darurat dari level 4 ke level 3 mempertimbangkan menurunnya kasus Covid-19. Seiring itu, komunikasi publik pemerintah mulai mengarah pada kebijakan pemulihan ekonomi, ditandai dengan Pidato Presiden mengenai pemulihan ekonomi nasional setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 pada 30 September 2021.

Dengan kata lain, temuan ini perlu ditaruh dalam konteks periode pengamatan kami. Hal ini penting dikemukakan mengingat studi-studi sebelumnya menunjukkan pola pemberitaan media yang berorientasi "jurnalisme pernyataan" membuat agenda media tak berbeda dengan agenda pemerintah. Hal ini antara lain ditemukan dalam riset mengenai pemberitaan vaksin (Heychael, 2020) atau liputan tunawisma yang sempat ramai di awal tahun (Rangga Naviul Wafi, 2021).



Muhammad Soufi Cahya Gemilang/Remotivi

Apartemen Bassura terlihat dari salah satu sudut jalan di Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur.

### Pola Pemberitaan Televisi dan Media Daring

Hasil analisis konten kami menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan di antara pola pemberitaan televisi dan media daring. Salah satu yang paling mencolok adalah hanya ada 52 berita terkait kebijakan PPKM yang ditayangkan oleh televisi, sementara ada 4971 artikel berita mengenai PPKM di media daring. Akan tetapi, 52 berita ini tereliminasi dalam proses pengambilan sampel yang menggunakan pendekatan constructed week.¹ Konsekuensinya, penelitian ini tidak menganalisis berita-berita televisi mengenai PPKM.

Dalam konteks televisi, pemberitaan seputar Covid-19 umumnya mengabarkan sebuah peristiwa kebijakan atau peristiwa terkait kebijakan. "Peristiwa kebijakan" adalah momen kala pemerintah, baik pusat maupun daerah, membuat siaran pers terkait PPKM, pelaksanaan vaksinasi, dll. Sementara itu, "peristiwa seputar kebijakan" adalah respons masyarakat ataupun pengamat atasnya. Pemberitaan televisi umumnya menayangkan berita jika ada momentum atau peristiwa besar tertentu, misalnya ketika Presiden Joko Widodo menjadi penerima vaksin Covid-19 pertama atau kala kondisi rumah sakit melebihi kapasitas akibat banyaknya pasien Covid-19. Inilah mengapa meski bisa dikatakan PPKM berlaku hampir sepanjang tahun, berita mengenainya muncul hanya jika ada perubahan besar terkait kebijakan ini. Di luar itu, televisi tidak memberi ruang terlalu banyak.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan cara memilih hari kalender (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu). Dari setiap hari kalender, kami memilih dua tanggal berbeda dengan hari yang sama. Sebagai gambaran, kami memilih dua hari Minggu dengan tanggal yang berbeda, yaitu 17 Januari dan 18 April, dan hari Senin dengan tanggal 3 Mei dan 28 Juni. Cara ini kami lakukan untuk hari kalender lainnya. Tujuan pemilihan dua hari kalender dengan tanggal yang berbeda adalah memastikan setiap hari kalender masuk dalam analisis kami dan merepresentasikan tanggal lainnya.

Pendekatan televisi berbeda dengan model liputan media daring. Data yang kami analisis menunjukkan pemberitaan media daring cenderung reaksioner terhadap suatu isu karena adanya tuntutan kecepatan penerbitan berita. Media daring juga banyak memproduksi berita yang berasal dari konten viral di media sosial atau menulis banyak berita dengan isi yang serupa tetapi mengubah *angle* pemberitaan. Misalnya, pemberitaan terkait pengumuman PPKM yang diperpanjang oleh pemerintah atau protes warga atas penerapan PPKM bisa ditulis menjadi beberapa berita. Media daring hanya mengubah *angle* atau menambah pernyataan dari narasumber yang berbeda. Walhasil, tidak mengherankan bila pemberitaan PPKM di media daring menempati urutan kedua terbanyak setelah berita vaksinasi. Total berita PPKM di media daring yang masuk dalam sampel kami sebanyak 95 artikel. Jumlah ini hanya selisih 21 artikel dengan berita vaksinasi yang berjumlah 116 artikel.

Selain PPKM, isu pendidikan, seperti bantuan pendidikan untuk sekolah, guru, dan pelajar juga kurang mendapat perhatian televisi. Selama bulan Januari hingga Juni 2021, tvOne dan Metro TV masing-masing hanya memberitakan bantuan pendidikan sebanyak sekali. Jumlah ini jauh berbeda media daring yang memproduksi ribuan berita bantuan pendidikan dalam periode yang sama.

### Sejauh Apa Media-media Nasional Meliput Isu Jakarta?

Dalam kurun enam bulan pemantauan kami, berita media daring dan televisi yang berasal dari Jakarta jumlahnya mendominasi ruang pemberitaan media.

DAERAH ASAL BERITA TELEVISI DAN DARING

Daerah Asal Berita	Televisi	Daring
Jakarta	41%	59,1%
Kota Selain Jakarta	47%	18,2%
Jakarta dan Kota Lainnya	2%	0,4%
Tidak disebutkan	10%	21,8%
Luar Negeri	0%	0,4%
Total	100% (180)	100 (445)

Penting dicatat di sini, dominasi berita Jakarta lebih kentara di media daring ketimbang televisi. Sementara di media daring berita asal Jakarta hampir 3 kali lipat dari berita yang berasal dari kota lain, di televisi berita Jakarta dan kota lain hanya selisih 11 Berita.

Setara dengan temuan umum yang menunjukkan bahwa isu kesehatan mendominasi, topik kesehatan juga mendominasi berita asal Jakarta. Dalam konteks televisi, topik vaksin mendominasi. Sementara itu, di media daring terdapat dua topik yang menjadi perhatian yakni vaksin dan PPKM. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, pada konteks televisi, PPKM umumnya diberitakan kala kebijakan baru diumumkan pemerintah. Hal ini menyebabkan isu PPKM tidak terjaring oleh metode sampling kami.

### DAERAH ASAL BERITA TELEVISI

Topik	Jakarta	Selain Jakarta	Jakarta dan kota lainnya	Tidak disebutkan
Non-kesehatan	29,7%	28,2%	75%	35,3%
Kesehatan	70,3%	71,8%	25%	64,7%
Total	100% (74)	100% (85)	100% (4)	100% (17)

### **DAERAH ASAL BERITA DARING**

Topik	Jakarta	Jakarta dan kota lainnya	Luar negeri	Selain Jakarta	Tidak disebutkan
Non- kesehatan	30,8%	100%	50%	29,6%	53,6%
Kesehatan	69,2%	-	50%	70,4%	46,4%
Total	100% (263)	100% (2)	100% (2)	100% (81)	100% (97)

Terlepas dari persoalan frekuensi pemberitaan, penelitian ini juga coba melihat sejauh apa berita-berita asal Jakarta relevan dengan kebutuhan lokal Jakarta. Relevansi ini kami periksa dengan membandingkan daerah asal berita dengan dimensi berita. Dimensi berita kami tentukan dari narasumber yang dikutip dalam berita. Narasumber dalam konteks pemberitaan menunjukkan lingkup isu yang diangkat. Dalam konteks penelitian ini, kami membagi kategori narasumber ke dalam kategori nasional dan lokal. Berita yang mengutip narasumber pejabat lokal hampir bisa dipastikan mengangkat isu yang levelnya lokal dan begitu sebaliknya. Dengan kata lain, semakin lokal sebuah berita, semakin relevan ia dengan khalayak yang mengkonsumsinya. Hasil pantauan kami, baik di televisi maupun di media daring, mayoritas narasumber berita adalah pejabat eksekutif di tingkat pusat.

### NARASUMBER MEDIA DARING

Pemerintah pusat	39,3%
Pemerintah daerah non-Jakarta	11,3%
Tim ad hoc bentukan pemerintah	7,1%
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	5,7%
Polisi	4,6%
Profesional/pakar kesehatan	5,7%
Lembaga negara non-kementerian	2,8%
Tenaga pendidik/penunjang pendidikan	1,4%
Lainnya	17,2%
Narasumber tidak ada/tidak jelas	4,8%
Total	100%

Total jumlah narasumber 702

### NARASUMBER TV

Pemerintah pusat	28%
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	6,8%
Pemerintah daerah non-Jakarta	10,1%
Lembaga negara non-kementerian	2,4%
Profesional/pakar kesehatan	5,8%
Polisi	2,4%
Narasumber tidak ada/tidak jelas	32,4%
Warga	4,8%
Lainnya	7,2%
Total	100%

Total jumlah narasumber 207

Hasilnya, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah, jumlah berita Jakarta berdimensi lokal jumlahnya cukup signifikan baik di televisi (31,8%) maupun media daring (46%).

### **DAERAH ASAL BERITA DARING**

Asal Berita	Antarlokal	Internasional	Lokal	Nasional	Tidak disebutkan
Jakarta	-	20%	31,8%	72,8%	42,9%
Jakarta dan kota lainnya	100%	-	-	-	2,4%
Luar negeri	-	40%	-	-	-
Selain Jakarta	-	-	66,4%	2,1%	4,8%
Tidak disebutkan/ dijelaskan	-	40%	1,8%	25,1%	50%
Total	1	5	110	287	42

### **DAERAH ASAL BERITA DARING**

Asal Berita	Antarlokal	Lokal	Nasional	Tidak disebutkan
Jakarta	-	31%	46%	23%
Jakarta dan kota Iainnya	-	-	50%	50%
Selain Jakarta	11%	59%	13%	17%
Tidak disebutkan/ dijelaskan	-	11.8%	76.5%	11.7%
Total	9	75	60	36

Temuan kami menunjukkan dua hal: besarnya frekuensi berita Jakarta secara umum dan bahwa berita Jakarta berdimensi lokal. Hal ini tidaklah mengejutkan mengingat ekosistem industri media di Indonesia amatlah tersentralisasi di Jakarta (Tirto.id, 2018). Pemusatan kantorkantor media dan industri pendukungnya di Jakarta menghasilkan pemberitaan yang terfokus di kota ini dan sekitarnya. Pada gilirannya, sentralisasi ekonomi media menghasilkan pola pemberitaan yang sifatnya dari, oleh, dan untuk warga Jakarta.

Secara khusus, efek sentralisasi terasa lebih kuat di media daring. Hal ini ditandai oleh ketimpangan porsi berita Jakarta dengan berita dari luar jakarta yang jauh lebih besar di media daring ketimbang televisi (lihat tabel "Daerah Asal Berita Daring"). Pola produksi berita daring patut diduga menyumbang pada ketimpangan ini. Produksi berita harian yang membutuhkan waktu cepat dan dalam jumlah besar melahirkan fokus peliputan yang Jakarta sentris. Dalam logika ekonomi, praktik ini masuk akal, sebab meliput berita di Jakarta membutuhkan biaya produksi yang lebih murah.

# Sisi Permintaan Informasi



# Sisi Permintaan Informasi

# Kebutuhan Informasi dari Media: Ekonomi Menjadi Faktor Dominan

Kami bertanya pada warga, informasi apa yang mereka butuhkan dan tidak dapat ditemukan di media massa. Kami menggunakan dua metode pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan tersebut yakni survei dan FGD. Adapun terkait survei, sebagaimana telah dijelaskan di bagian metodologi, variabel "warga" dipilah menjadi dua kategori yaitu ekonomi dan gender. Setelah dilakukan analisis, kami menemukan gender tidak berpengaruh signifikan terhadap semua aspek kebutuhan informasi. Untuk itu, presentasi temuan pada bagian ini akan lebih berfokus pada variasi kebutuhan informasi warga berdasarkan ekonomi daerah.

Dua kategori informasi yang paling dibutuhkan warga dalam konteks kesehatan adalah "PPKM" dan "pengobatan Covid-19". Temuan ini konsisten, baik bagi warga rawan miskin maupun tidak rawan miskin.

# KEBUTUHAN INFORMASI KESEHATAN YANG KURANG DIPENUHI MEDIA MASSA, BERDASARKAN EKONOMI DAERAH

Informasi	Rawan kemiskinan	Tidak rawan kemiskinan
Obat-obatan	24,5%	23,3%
Tidak ada	23,4%	13,2%
Pembatasan kegiatan masyarakat	18,1%	14,0%
Vaksinasi	13,8%	14,0%
Testing dan tracing	6,4%	10,9%
BPJS Kesehatan	4,3%	5,4%
Telemedicine	4,3%	10,1%
Lainnya	2,2%	3,9%
Pencegahan Covid-19	1,1%	0%
Insentif tenaga kesehatan	1,1%	3,1%
Fasilitas kesehatan	1,1%	2,3%
Total	100	100

Dari dua isu yang muncul dalam bidang kesehatan, menarik untuk mengamati adanya kebutuhan akan informasi mengenai obat-obatan untuk mengatasi Covid-19. Data ini menunjukkan bahwa perhatian utama warga adalah soal "penyembuhan" ketimbang "pencegahan". Dalam sesi FGD, kami menemukan bahwa ada dua kebutuhan informasi mengenai obat. Pertama, kebutuhan soal obat apa saja yang efektif untuk menyembuhkan gejala Covid-19. Kedua, kebutuhan soal akses obat gratis dari puskesmas.

Kayak obat Covid minum apa sih, ini dari mana sih. Informasi resminya gitu Iho, yang harusnya [di]info[kan] itu ke masyarakat [yang] sudah paten. (Mahasiswa, perempuan, daerah tidak rawan miskin, Tanjung Duren

### Selatan)

Kayaknya yang [obat] itu buat orang-orang yang isolasi mandiri, saya juga kurang tahu soalnya saya belum lihat sendiri ada orang Puskesmas mengantarkan obat ke rumah yang isolasi mandiri. (Karyawan swasta, laki-laki, daerah rawan miskin, Krendang)

Dalam konteks ekonomi, dua isu yang mengemuka adalah informasi soal "kartu prakerja" dan "bantuan langsung tunai".

# KEBUTUHAN INFORMASI EKONOMI YANG KURANG DIPENUHI MEDIA MASSA, BERDASARKAN EKONOMI DAERAH

Informasi	Rawan kemiskinan	Tidak rawan kemiskinan
Bantuan Langsung Tunai	41%	29%
Kartu Prakerja	19%	23%
Tidak tahu	15%	9%
Subsidi gaji karyawan	6%	7%
Pembatasan operasional usaha	5%	9%
UMKM	4%	2%
Insentif tarif listrik	3%	7%
Bantuan sosial lainnya	3%	9%
Lainnya	2%	5%
Total	100	100

Temuan ini bisa dibaca dari dua perspektif. Pertama, bahwa pandemi membuat ekonomi warga rawan miskin dan tidak rawan miskin terdampak secara merata. Meski informasi bantuan sosial lebih dominan dibutuhkan warga rawan miskin, informasi serupa juga menjadi informasi

yang paling dibutuhkan kelompok warga tidak rawan miskin. Kedua, data ini juga bisa dibaca sebagai bias metodologis. Seiring dengan sulitnya melakukan riset lapangan di daerah tidak rawan miskin, kami harus mengganti sejumlah sampel daerah sehingga lebih mendekati indeks ekonomi rawan miskin.

Dalam sesi FGD, terungkap bahwa persoalan informasi bantuan langsung tunai umumnya terkait informasi soal prosedur dan siapa yang berhak mendapat bantuan. Warga mengaku informasi terkait hal ini kerap simpang-siur. Beberapa responden mempertanyakan soal frekuensi bantuan yang diterima. Beberapa yang lain mempersoalkan apakah penerima bantuan harus sudah divaksin atau tidak.

Iya, hambatannya ya. Waktunya enggak pas, Kak. Tanggalnya, waktu pertama dapat bansos kan waktunya pas tuh, sebulan sekali. Sekarang dirapel jadi dua bulan sekali. (Pedagang, perempuan, daerah rawan miskin, Jakarta Pusat)

Kebanyakan yang warga asli RT 7 malah yang nggak dapat, kayak orang tua saya itu nggak dapat. Orangorang yang baru daftar, kayak punya KK baru itu yang dapat, yang baru daftar pas awal-awal Covid. (Karyawan swasta, laki-laki, daerah rawan miskin, Jakarta Timur)

Sementara itu, terkait dengan PPKM, warga mempersoalkan tak jelasnya informasi praktik usaha ketika PPKM. Pada umumnya, kebutuhan informasi terkait PPKM berkonteks ekonomi. Warga menilai simpang siurnya praktek PPKM menyebabkan mereka kesulitan menjalankan usaha, seperti terungkap dari kutipan dalam sesi FGD di bawah ini.

Kalau misalkan memang dibatasi jam operasionalnya ... itu akan menjadi masalah buat yang berjualan sih, salah satunya omsetnya. Terus ya itu [berpengaruh ke] omset

pendapatan kan. Lebih ke situ sih. (Ketua RT, Laki-laki, Daerah Rawan Miskin, Jakarta Timur)

Di bidang pendidikan, sebagaimana terungkap dalam survei, kebutuhan warga rawan miskin maupun tidak rawan miskin adalah informasi "rencana belajar luring" dan "bantuan kuota pulsa".

# KEBUTUHAN INFORMASI PENDIDIKAN YANG KURANG DIPENUHI MEDIA MASSA, BERDASARKAN EKONOMI DAERAH

Informasi	Rawan kemiskinan	Tidak rawan kemiskinan
Bantuan kuota pulsa	36%	27%
Rencana belajar luring	33%	47%
Kebijakan mengenai ujian	15%	0%
Tidak ada	7%	22%
Bantuan biaya sekolah	3%	2%
Peminjaman gawai	3%	0%
Pendaftaran sekolah	0%	2%
Total	100	100

Seperti halnya informasi di bidang kesehatan dan ekonomi, kebutuhan informasi dalam konteks pendidikan umumnya berkaitan dengan kebingungan warga atas prosedur mengakses bantuan. Hal ini terungkap dalam pernyataan seorang partisipan FGD di bawah.

Dulu dapat [bantuan kuota], tapi sekarang nggak dapat lagi. Saya juga kurang tahu juga itu. ... Kalau beli kuota sekarang biaya sendiri. Ya, kalau yang masih ada ini uang, kalau nggak ada kan repot. Semua orang kan beda-beda ya. (Ketua RT, Laki-laki, Daerah Tidak Rawan Miskin, Jakarta Timur)

Adapun berkaitan dengan "rencana belajar luring", warga umumnya bertanya mengenai kapan belajar luring mulai diberlakukan. Hal ini bertaut dengan minimnya infrastruktur internet untuk menopang kegiatan pendidikan secara daring.

Gimana sih, orang tua juga pada ngeluh. Sudah sih cepetan ini apa pandemi kelar, jangan kayak gini saja, capek, belajar lewat online mulu. Walaupun dapat kuota juga, kalau pas lagi lemot, susah, gitu. (Kader PKK, Perempuan, Daerah Rawan Miskin, Jakarta Barat)

Beberapa temuan di atas bagi kami adalah sebuah pertanda bahwa informasi terkait ekonomi adalah informasi yang paling dibutuhkan warga. Ekonomi menjadi irisan utama berbagai bidang kehidupan (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi) yang coba kami gali. Dalam konteks kebutuhan informasi pendidikan dan kesehatan sekalipun, aspek ekonomi mengemuka. Hal ini misalnya bisa dilihat dari kebutuhan warga akan informasi terkait PPKM, umumnya berkaitan erat dengan bagaimana cara untuk bekerja atau berusaha dalam pembatasan sosial. Begitu juga halnya dengan obat, salah satu hal yang dikeluhkan warga adalah bagaimana mengakses obat gratis dari Puskesmas. Hal yang sama bisa kita temukan dari keluhan mengenai minimnya informasi cara mengakses kuota internet untuk pendidikan.

Temuan ini mengonfirmasi survei Lembaga Survei Indonesia yang menyimpulkan bahwa terjadi pergeseran harapan masyarakat dari kebutuhan akan kesehatan ke kebutuhan ekonomi (Media Indonesia, 2021). LSI menyebutkan bahwa pada September 2020, mayoritas publik berharap pemerintah memprioritaskan aspek kesehatan (60,5%) dan hanya 36% responden yang memprioritaskan ekonomi. Namun, dalam survei terakhir yang dilakukan bulan Juni 2021, jumlah responden yang ingin pemerintah memprioritaskan ekonomi naik menjadi 50,7%. Dalam riset yang sama, LSI menilai tekanan ekonomi yang diakibatkan oleh PPKM mendorong perubahan prioritas publik.

Sayangnya, temuan terkait sisi permintaan informasi yang menunjukkan besarnya aspek kebutuhan informasi ekonomi tidak bisa didialogkan dengan temuan analisis media yang menunjukkan agenda utama media adalah isu kesehatan karena perbedaan periode waktu penelitian. Sementara pemantauan media fokus pada pemberitaan semester awal tahun 2021 (Januari-Juni 2021), proses pengambilan data lapangan dilakukan dari Juni hingga Agustus 2021. Pada akhirnya, perbedaan periode tersebut membuat penelitian ini tidak mampu merekam secara setara aspek pasokan dan permintaan informasi dalam momentum yang sama.

Kendati demikian, satu aspek yang bisa didialogkan antara kebutuhan publik dari media massa dengan pasokan informasi media adalah terkait skala pemberitaan. Mayoritas pemberitaan media mengangkat isu-isu makro terkait pandemi, namun sedikit sekali mengangkat aspek teknis dan lokal dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal ini ditandai dengan besarnya ruang yang diberikan media terhadap narasumber dari pemerintah pusat yang umumnya adalah menteri atau presiden. Sementara itu, media daring (5,7%) dan televisi (6,8%) hanya memberi ruang yang minim bagi narasumber Pemprov DKI Jakarta, yang lebih mungkin membicarakan aspek yang lebih lokal dan spesifik DKI Jakarta. Hal ini disayangkan karena warga Jakarta butuh informasi spesifik, semisal prosedur akses bantuan. Informasi-informasi inilah yang kemudian mereka coba akses di tingkat lokal (saluran komunikasi tingkat RT), sebagaimana akan kita bahas di bagian berikutnya.

## Kebutuhan Informasi: Yang Hilang dari Media Ditemukan dalam Saluran Komunikasi di Level Komunitas

Kami menemukan dua hal menarik kala bertanya pada warga terkait informasi apa yang dibutuhkan dan tidak mereka dapatkan dari saluran komunikasi di tingkat RT. Pertama, ada perubahan jawaban kala kami bertanya hal yang sama terkait media massa. Perubahan ini terlihat

dari menghilangnya beberapa isu dominan terkait aspek kesehatan dan ekonomi yang muncul dalam pertanyaan terkait media massa. Hal ini menandai sebagian informasi yang dicari warga di media massa mampu ditemukan warga di level komunitas.

Kedua, ada perbedaan ekspektasi warga dari saluran komunikasi di tingkat RT dengan media massa. Hal ini bisa dikenali dari munculnya kebutuhan informasi yang tidak dinyatakan warga dalam pertanyaan mengenai media massa dan muncul dalam kategori kebutuhan informasi di saluran tingkat RT.

# KEBUTUHAN INFORMASI KESEHATAN YANG KURANG DIPENUHI SALURAN KOMUNIKASI RT, BERDASARKAN EKONOMI DAERAH

Informasi	Rawan kemiskinan	Tidak rawan kemiskinan
Vaksinasi	32%	27%
Testing dan tracing	25%	16%
Telemedicine	13%	10%
Obat-obatan	12%	18%
Pembatasan kegiatan masyarakat	8%	16%
BPJS Kesehatan	7%	4%
Fasilitas kesehatan	2%	2%
Insentif tenaga kesehatan	2%	0%
Lainnya	0%	8%
Total	100	100

KEBUTUHAN INFORMASI KESEHATAN YANG KURANG DIPENUHI SALURAN KOMUNIKASI RT, BERDASARKAN GENDER

Informasi	Laki-laki	Perempuan
Obat-obatan	21,8%	25,1%
Pembatasan kegiatan masyarakat	18,3%	13,5%
Tidak ada	16,3%	19%
Vaksinasi	13,6%	14,4%
Telemedicine	10%	5,4%
Testing dan tracing	8,2%	10%
BPJS Kesehatan	7,3%	2,7%
Insentif tenaga kesehatan	1,8%	2,7%
Lainnya	1,8%	4,5%
Pencegahan Covid-19	0,9%	0%
Fasilitas Kesehatan	0%	2,7%
Total	100% (110)	100% (111)

Berbeda dengan kebutuhan informasi di media massa, kebutuhan informasi mengenai pembatasan kegiatan masyarakat tidak lagi dominan dalam konteks saluran informasi di tingkat RT. Sebaliknya, ada perubahan kebutuhan di antara warga rawan miskin dan tidak rawan miskin dalam konteks kebutuhan informasi persebaran Covid-19 (testing dan tracing). Jika dalam konteks media massa, kebutuhan informasi testing dan tracing di kalangan warga tidak rawan miskin mencapai 10.9% dan 6.4% di kalangan warga miskin, berbeda halnya dengan saluran komunikasi di tingkat RT. Kebutuhan warga rawan miskin dan tidak rawan miskin sama-sama meningkat menjadi 25% dan 16%.

Riset ini juga menemukan variasi kebutuhan informasi kesehatan berdasarkan gender. Bila data kita lihat dari kategori gender, responden laki-laki maupun perempuan mengatakan bahwa informasi mengenai obat-obatan paling banyak tidak mereka temukan di saluran komunikasi di tingkat RT. Sementara, layanan *telemedicine* lebih banyak dibutuhkan laki-laki ketimbang perempuan.

Pada bidang ekonomi, kebutuhan informasi yang tak lagi dominan di saluran komunikasi tingkat RT dibanding dengan media massa adalah yang terkait kartu prakerja.

### KEBUTUHAN INFORMASI EKONOMI YANG KURANG DIPENUHI SALURAN KOMUNIKASI RT

Bantuan Langsung Tunai	40,58%
Tidak ada	16,67%
Bantuan sosial lainnya	16,67%
Kartu Prakerja	6,52%
Insentif tarif listrik	4,35%
Aturan pembatasan operasional pusat perbelanjaan	2,90%
UMKM	2,90%
Tidak tahu	0,72%

<sup>\*</sup> Responden yang mencari informasi ekonomi di saluran RT: 109 orang

Variabel ekonomi daerah dan gender tidak berpengaruh pada kebutuhan informasi ekonomi.

<sup>\*\*</sup> Responden dapat memilih lebih dari 1 jawaban

Di sisi lain, informasi soal "Bantuan Tunai Langsung" konsisten menjadi informasi yang paling dicari, baik dari media massa maupun saluran komunikasi tingkat RT. Dalam sesi IDI dan FGD, kebutuhan akan informasi mengenai Bantuan Tunai Langsung umumnya bertaut dengan kesimpangsiuran data penerima bantuan. Responden mengeluhkan ketidakjelasan prosedur yang menyebabkan mereka kehilangan hak atau kehilangan kesempatan mengakses bantuan tersebut.

Di bidang pendidikan, dua kategori informasi yang paling dibutuhkan masih sama dengan media massa yakni "bantuan kuota pulsa" dan "rencana belajar luring". Kendati demikian, jumlahnya jauh berkurang. Jika dalam konteks kebutuhan informasi di media massa sebanyak 43 warga rawan miskin dan tidak rawan miskin mengatakan mereka tidak menemukan informasi mengenai rencana belajar luring di media, dalam konteks saluran komunikasi tingkat RT, jumlahnya hanya 10. Begitu juga halnya dengan kebutuhan informasi mengenai "bantuan kuota pulsa", menurun dari 35 ke 15.

KEBUTUHAN INFORMASI PENDIDIKAN YANG KURANG DIPENUHI SALURAN KOMUNIKASI RT, BERDASARKAN EKONOMI DAERAH

Informasi	Rawan kemiskinan	Tidak rawan kemiskinan
Bantuan kuota pulsa	39%	32%
Akses WiFi gratis	26%	5%
Bantuan biaya sekolah	13%	5%
Rencana belajar luring	9%	42%
Pendaftaran sekolah	9%	5%
Peminjaman gawai	4%	0%
Kebijakan mengenai ujian	0%	11%
Lainnya	0%	0%
Total	100	100

Hasil survei juga menemukan variasi kebutuhan informasi pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Informasi mengenai "rencana belajar luring" dan "bantuan kuota pulsa" mayoritas dicari oleh perempuan. Sementara itu, informasi mengenai kebijakan ujian nasional selama pandemi lebih dibutuhkan oleh laki-laki.

# KEBUTUHAN INFORMASI PENDIDIKAN YANG KURANG DIPENUHI SALURAN KOMUNIKASI RT, BERDASARKAN GENDER

Informasi	Laki-laki	Perempuan
Kebijakan mengenai ujian sekolah	24%	0%
Akses WiFi gratis	20%	9,52%
Rencana belajar luring dari sekolah	16%	47,62%
Bantuan kuota pulsa untuk pelajar dan guru	16%	42,86%
Bantuan biaya sekolah	4%	9,52%
Pendaftaran sekolah	4%	4,76%
Lainnya	4%	0%
Total	25	21

Data di atas menunjukkan bahwa semakin lokal sumber informasi, semakin mampu ia memenuhi kebutuhan warga. Dalam sesi FGD, terungkap dua hal yang relevan dengan pemenuhan kebutuhan informasi. Pertama, proses komunikasi dua arah yang terjadi di level komunitas membantu warga mengakses informasi spesifik sesuai kebutuhan sekaligus mengonfirmasi hal yang kurang dipahami dalam prosesnya. Kedua, RT sebagai kepala dari komunitas berperan penting dalam menentukan arus informasi. Semakin berhasil seorang RT menjadi "penyalur informasi", semakin berkurang ketidakpastian warga atas berbagai hal terkait pandemi. Sebaliknya, jika RT di wilayah tersebut kurang komunikatif, kebutuhan informasi akan semakin meningkat.

Kebetulan yang di Tebet tempat saya tinggal ini Pak RW-nya agak-agak aktif ya. Lagi kebetulan saja sekarang ini RW-nya aktif. Bukan berarti saya menyamaratakan RW-RW lain ya, khusus RW yang tempat saya tinggal saja. (Ibu rumah tangga, perempuan, daerah tidak rawan miskin, Jakarta Selatan)

Saya dapat informasinya dari RT/RW karena kebetulan seperti Ibu Wiwik barusan, saya dapat informasi dari grup WhatsApp dari Bapak RT/RW. Yang mereka sampaikan dari awal mula Covid itu tentang pembatasan area jalanan, tentang PSBB. Lalu protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan ada baliho-balihonya, dan penyekatan jalan-jalan. (Pekerja sosial, perempuan, daerah tidak rawan miskin, Jakarta Selatan

Wawancara kami juga mengungkap bahwa perangkat pemerintahan terbawah pun saling berkomunikasi menggunakan grup WhatsApp sebelum meneruskan informasi ke masyarakat. RW dan RT memperoleh informasi resmi dari pihak kelurahan yang kemudian dibagikan kepada warga melalui grup WhatsApp.

Mungkin dari kelurahan dulu, dari lurah ke RW. RW baru sebarkan ke RT-RT. Nanti surat itu diberi kabar kepada kelurahan, difoto, dikirim pihak kelurahan. Kita melalui estafet beritanya. Dari RW itu nanti kita foto, kirim ke RT. RT nanti kita kirim ke warga. Kita pake grup di sini semua, ada grup kita. Dari RW ke RT tuh ada grup, berita apa pun itu kita melalui grup. (Ketua RT, perempuan, daerah tidak rawan miskin, Jakarta Barat)

Besarnya peran RT sebagai aktor komunikasi di tingkat komunitas jugalah yang menyebabkan variasi tingkat kebutuhan yang berbeda di masing-masing RT. Perbedaan tingkat kebutuhan akan informasi "testing dan tracing" antara warga rawan miskin dan tidak rawan miskin juga

bisa dijelaskan dalam konteks peran RT. Dalam sesi FGD, beberapa RT dinilai responden memiliki masalah kredibilitas, sebagaimana terlihat dari kutipan di bawah:

Nah, barangkali pas sampai di kelurahan ada oknum yang berlagak sok jago, sok tahu masalah informasi gembar-gembor. ... Nah, mungkin misinformasi di situ ... padahal informasi nggak, sudah akurat dari pusat sampai ke bawah, sudah disusun. Cuma pas launching informasi itu dipercepat sama oknum-oknum yang pingin dapat rating yang naik gitu, bisa jadi. Saya pikir kayak gitu aja, simpel ajalah. (Karyawan swasta, laki-laki, daerah rawan miskin, Jakarta Timur)

# Akses Media: Dominasi Media Sosial, Televisi, dan Saluran Komunikasi di Tingkat RT

Media sosial, portal berita, dan saluran komunikasi di tingkat RT menjadi medium favorit warga mengakses informasi seputar pandemi. Temuan ini konsisten baik pada kategori responden berdasarkan ekonomi maupun gender. Temuan ini mengonfirmasi studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa penggunaan internet dan media sosial selama pandemi meningkat hingga 40% dari sebelum pandemi. Hal ini seiring dengan penerapan kebijakan bekerja dan belajar dari rumah yang diberlakukan selama pandemi.

### **MEDIA MENCARI INFORMASI SEPUTAR COVID-19**

Media sosial	45%
Televisi	31,5%
Portal berita	14,5%
Aplikasi pesan	6%
Situs pemerintah	1,5%
Google	1,5%
Total	100%

Tiga *platform* media sosial yang paling banyak digunakan oleh responden adalah Facebook, Instagram, dan YouTube. Urutan ini berbeda dengan laporan Hootsuite (2021) yang menemukan bahwa YouTube menempati urutan pertama media sosial yang paling banyak diakses di Indonesia. Temuan ini perlu dipahami dalam konteks bias usia responden dari riset ini yang mayoritas berusia 31-45 tahun. Sejak 2018, sebagaimana dilaporkan oleh Emarketer (2018), ada tren di mana

Facebook semakin ditinggalkan oleh pengguna berusia muda (0-24 tahun).

### MEDIA SOSIAL UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI PANDEMI

Facebook	62,35%
Instagram	52,35%
YouTube	44,71%
Tiktok	17,65%
Twitter	16,47%
Snack Video	1,18%
Quora	0,59%

<sup>\*</sup> Responden dapat memilih lebih dari 1 jawaban

Sementara dalam konteks televisi, tvOne menjadi televisi paling banyak diakses untuk informasi pandemi. Temuan ini selaras dengan laporan Katadata (2020) bahwa tvOne menjadi televisi paling diminati oleh penduduk Indonesia. Dalam konteks portal berita, Detik.com dan Kompas.com menjadi portal berita paling banyak diakses. Hal ini tidak mengherankan mengingat dalam berbagai studi mengenai akses media daring, dua media ini kerap muncul. Riset Remotivi (2021) mengenai informasi agama dan riset Reuters Institute (2021) mengenai konsumsi berita digital juga menemukan hal serupa. Kedua portal tersebut menduduki peringkat 1 dan 2 media daring paling sering diakses publik Indonesia.

### ENAM STASIUN TELEVISI PALING BANYAK DIAKSES UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI PANDEMI

tvOne	53,50%
RCTI	32,48%
Metro TV	26,75%
Indosiar	22,29%
SCTV	21,02%
Kompas TV	14,65%

<sup>\*</sup> Responden dapat memilih lebih dari 1 jawaban

# TIGA PORTAL BERITA DARING PALING BANYAK DIAKSES UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI PANDEMI

Detik	60,94%
Kompas	54,69%
Tribun	17,19%

<sup>\*</sup> Responden dapat memilih lebih dari 1 jawaban

Untuk memberikan gambaran yang lebih mikro mengenai akses media, studi ini juga menanyakan pada responden akses saluran informasi di tingkat komunitas (RT). Apa yang kami maksud dengan saluran komunikasi di tingkat RT adalah kanal komunikasi baik daring maupun luring yang aktor-aktornya merupakan komunitas terbatas di tingkat RT. Misal, grup WhatsApp, selebaran tertulis dari pejabat RT, serta interaksi langsung antarwarga dalam batas-batas RT.

Dalam survei, 88% warga mengaku mengakses saluran komunikasi di tingkat RT.

# APAKAH ANDA MENGAKSES SALURAN KOMUNIKASI DI TINGKAT RT?

Ya	88%
Tidak	12%
Total	100%

Interaksi langsung dan komunikasi menggunakan aplikasi pesan merupakan cara paling banyak digunakan untuk berkomunikasi di level komunitas. Temuan ini konsisten bahkan ketika data ditabulasi silang dengan variabel ekonomi daerah maupun gender.

### MEDIUM KOMUNIKASI TINGKAT RT

Interaksi langsung	81,25%
Aplikasi pesan	60,80%
Pengumuman luring	35,80%
Media luar ruang	1,14%

<sup>\*</sup> Responden dapat memilih lebih dari 1 jawaban

Adapun variasi bisa kita temukan pada jumlah warga rawan miskin dan tidak rawan miskin yang menggunakan aplikasi pesan untuk mengakses informasi di saluran komunikasi tingkat RT. Mereka yang berasal dari daerah tidak rawan miskin (60,9%) lebih dominan jumlahnya ketimbang rawan miskin (39,1%).

MEDIUM KOMUNIKASI RT YANG DIGUNAKAN, BERDASARKAN EKONOMI DAERAH

Medium Komunikasi	Rawan kemiskinan	Tidak rawan kemiskinan
Interaksi langsung	51,6%	43,8%
Pengumuman luring	24,6%	16,4%
Aplikasi pesan	23,8%	38,3%
Media luar ruang	0%	1,5%
Total	151	146

Selain melalui grup WhatsApp, interaksi langsung dianggap sebagai cara yang efektif karena memungkinkan umpan balik lebih cepat. Interaksi langsung dilakukan melalui kontak dengan pejabat pemerintah ataupun melalui forum-forum informal seperti arisan. Pada salah satu RT yang tergolong rawan miskin di Jakarta Timur, arisan secara tatap muka dilakukan secara rutin (sebulan sekali). Di sana, arisan dibagi berdasarkan gender, arisan khusus laki-laki dan perempuan. Di dalam forum tersebut, informasi yang berasal dari pemerintah biasanya didiseminasikan melalui mediasi dari ketua RT di arisan laki-laki dan para kader Dasa Wisma serta PKK di arisan perempuan.

Di beberapa daerah lainnya, interaksi langsung juga dilakukan di waktu luang seperti pada sore dan malam hari saat warga berkumpul. Karakteristik tempat tinggal warga yang berdekatan di wilayah rawan miskin memudahkan warga untuk bertemu di tempat berkumpul dan bertukar atau memverifikasi informasi.

Oh, harus dong, kan di sini kita kan masukin warga semua dulu nih. Dari nama, umur, kayak gitu. Nah, nanti di sini itu langsung disaring mana-mana yang termasuk lansia, kita harus ngedatangin dong. Kalau enggak kan ya enggak tahu, yang lansia atau enggaknya kan enggak tahu dia. Itu dari kita. (Kader PKK, perempuan, daerah rawan miskin, Jakarta Barat)

Karena di sini lingkungan padat penduduk, artinya lebih dengan tatap muka sebenarnya. Entah dari ke warung atau beli apa gitu. Karena lingkungannya padat penduduk di sini ya, jadi memang banyak yang secara langsung. (Ketua RT, laki-laki, daerah rawan miskin, Jakarta Timur)

### Berbagi Informasi

Secara umum, mayoritas responden membagikan informasi pada teman dan keluarga. Responden dari daerah rawan kemiskinan cenderung membagikan informasi pada komunitas warga terdekat (di pasar, di RT, dst.), sementara responden dari daerah tidak rawan kemiskinan lebih cenderung membagikan pada publik luas di media sosial.

Variabel gender tidak menghasilkan variasi yang signifikan.

### KEPADA SIAPA ANDA MEMBAGIKAN INFORMASI?

Teman/keluarga	79,5%
Komunitas warga	8%
Kepada banyak orang di media sosial	7%
Tidak membagikan pada siapa pun	4%
Rekan kerja	1,5%
Total	200

POLA MEMBAGIKAN INFORMASI, BERDASARKAN SASARAN DAN EKONOMI DAERAH

Kepada Siapa Membagikan Informasi?	Rawan kemiskinan	Tidak rawan kemiskinan
Teman/keluarga	78%	81%
Komunitas warga	11%	5%
Tidak membagikan pada siapa pun	5%	3%
Kepada banyak orang di media sosial	4%	10%
Rekan kerja	2%	1%
Total	100	100

<sup>\*</sup> Responden dapat memilih lebih dari 1 jawaban

Secara umum, mayoritas responden tidak membagikan informasi seputar Covid-19 di media sosial. Responden dari daerah rawan kemiskinan cenderung membagikan informasi melalui Facebook, sementara responden dari daerah tidak rawan kemiskinan lebih cenderung membagikan informasi melalui Instagram. Variabel gender tidak menghasilkan variasi yang signifikan.

MELALUI MEDIA SOSIAL APA ANDA MEMBAGIKAN INFORMASI?

Tidak membagi informasi melalui media sosial	60%
Facebook	18,5%
Instagram	15%
WhatsApp	4%
YouTube	1%
Twitter	1%
Tiktok	0,5%
Total	200

POLA MEMBAGIKAN INFORMASI,
BERDASARKAN *PLATFORM* DAN EKONOMI DAERAH

Melalui Media Sosial Apa Membagikan Informasi?	Rawan kemiskinan	Tidak rawan kemiskinan
Tidak membagikan informasi melalui media sosial	64%	56%
Facebook	24%	13%
Instagram	9%	21%
WhatsApp	2%	6%
Tiktok	1%	0%
Twitter	0%	2%
YouTube	0%	2%
Total	100	100

Daerah rawan kemiskinan cenderung membagikan informasi pada warga RT melalui interaksi langsung, dan cenderung lebih jarang melalui grup *chat*. Sementara itu, daerah tidak rawan kemiskinan cenderung tidak membagikan informasi pada warga RT. Ketika membagikan pun, interaksi langsung lebih jarang dilakukan dibandingkan daerah rawan kemiskinan. Persentase warga di daerah tidak rawan kemiskinan untuk membagikan melalui grup *chat* lebih tinggi dari daerah tidak rawan kemiskinan.

Dalam variabel gender, laki-laki lebih cenderung untuk tidak membagikan informasi pada warga RT daripada perempuan. Laki-laki cenderung lebih jarang membagikan informasi melalui grup *chat* ketimbang perempuan. Laki-laki maupun perempuan lebih cenderung untuk membagikan informasi melalui interaksi langsung.

### POLA MEMBAGIKAN INFORMASI DI SALURAN KOMUNIKASI RT

Interaksi langsung	45,5%
Tidak membagikan informasi	30%
Group chat	23%
Personal chat	1%
Tidak mengakses	0,5%
Total	100%

# POLA MEMBAGIKAN INFORMASI DI SALURAN KOMUNIKASI RT, BERDASARKAN EKONOMI DAERAH

Medium Komunikasi	Rawan Kemiskinan	Tidak Rawan Kemiskinan
Interaksi langsung	60%	31%
Tidak membagikan	23%	37%
Group chat	16%	30%
Personal chat	1%	1%
Tidak mengakses	0%	1%
Total	100	100

# POLA MEMBAGIKAN INFORMASI DI SALURAN KOMUNIKASI RT, BERDASARKAN GENDER

Medium Komunikasi	Laki-Laki	Perempuan	Tidak Menjawab
Interaksi langsung	21%	24%	0,5%
Tidak membagikan	18,5%	11,5%	-
Group chat	9%	14%	-
Personal chat	0,5%	0,5%	-
Tidak mengakses	0,5%	-	-
Total	99	100	1

# Kepercayaan pada Platform Media

### Kepercayaan Umum pada Media

Penelitian ini menemukan ada pandangan normatif bahwa media arus utama bisa dipercaya, sementara media sosial tidak. Hasil survei menemukan bahwa mereka yang percaya pada media arus utama lebih dominan jumlahnya ketimbang mereka yang lebih percaya pada media sosial. Pandangan ini konsisten sekalipun data survei dilihat dari variabel ekonomi daerah maupun gender. Temuan ini selaras dengan riset yang dipublikasikan oleh Edelman (CBSnews.com, 2018) di mana 60% responden yang berasal dari Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris menilai media sosial adalah ruang dimana hoaks dan disinformasi tersebar.

Senada dengan riset Edelman, hoaks dan minimnya penyaringan informasi di media sosial juga memicu rendahnya ketidakpercayaan responden. Hal ini dapat diidentifikasi dari alasan yang disampaikan responden kala menjawab mengapa mereka tidak mempercayai media sosial yang antara lain "sumber informasi tidak valid atau tidak resmi" (karyawan swasta, laki-laki, daerah tidak rawan miskin, Jakarta Barat) atau "kadang ada berita *hoax*, berita ga bener yang di-share di Facebook" (karyawan swasta, perempuan, Jakarta Timur).

PLATFORM YANG PALING DIPERCAYA, BERDASARKAN EKONOMI DAERAH

Media paling dipercaya	Rawan kemiskinan	Tidak rawan kemiskinan
Media arus utama	45%	35%
Media sosial	23%	23%
Percaya semua	9%	12%
Saluran komunikasi RT	21%	18%
Tidak tahu	2%	12%
Total	100	100

### PLATFORM YANG PALING DIPERCAYA, BERDASARKAN GENDER

Media paling dipercaya	Laki-laki	Perempuan
Media arus utama	38,38%	41%
Media sosial	22,22%	24%
Percaya semua	10,10%	11%
Saluran komunikasi RT	19,19%	20%
Tidak tahu	10,10%	4%
Total	100%	100%

Kendati demikian, ketidakpercayaan pada media sosial mesti dipahami dalam konteks media sosial sebagai sebuah *platform* dan bukan dalam konteks penggunanya. Pada dasarnya, penggunaan media sosial untuk mengakses informasi masih besar. Dalam penelitian ini, media sosial menempati posisi kedua setelah media arus utama sebagai media yang paling dipercaya. Dalam akses informasi di media sosial, responden cenderung mengakses informasi dari sumber-sumber yang dikenal, seperti diungkapkan oleh seorang responden terkait mengapa ia lebih percaya informasi yang ada di media sosial: "Di Instagram

banyak penyintas Covid yang membagikan informasi tentang *swab*, obatnya, gejalanya" (ibu rumah tangga, perempuan, daerah rawan miskin, Jakarta Barat). Dalam konteks lain, umumnya akses media sosial ditentukan oleh "kedekatan" (keluarga atau tetangga yang dipercaya).

### PLATFORM YANG PALING TIDAK DIPERCAYA, BERDASARKAN EKONOMI DAERAH

Media paling tidak dipercaya	Rawan kemiskinan	Tidak rawan kemiskinan
Media sosial	39%	34%
Saluran komunikasi di tingkat RT	20%	19%
Tidak tahu	19%	26%
Percaya semua	13%	10%
Media arus utama	9%	11%
Total	100	100

### PLATFORM YANG PALING TIDAK DIPERCAYA, BERDASARKAN GENDER

Media paling tidak dipercaya	Laki-laki	Perempuan	Tidak menjawab
Media sosial	33,3%	39%	100%
Tidak tahu	27,3%	18%	0%
Saluran komunikasi di tingkat RT	16,2%	23%	0%
Percaya semua	13,1%	10%	0%
Media arus utama	10,1%	10%	0%
Total	99	100	1

Dua faktor yang cukup sering diulang oleh responden untuk mendukung kepercayaan mereka terhadap media arus utama adalah adanya *gatekeeper* dan pengalaman menyaksikan sendiri peristiwa yang dilaporkan (khusus televisi). Khusus pada aspek kedua, responden umumnya bicara mengenai televisi sebagai medium yang bisa membawa penonton melihat kejadian secara langsung. Dalam jawaban terbuka pada survei yang kami lakukan, seorang responden mengatakan "karena kalau dalam televisi kan kita dengar sendiri dan kita lihat sendiri beritanya" (ibu rumah tangga, perempuan, daerah rawan kemiskinan, Jakarta Timur). Selain itu, alasan lain yang juga mengemuka adalah "karena memiliki sumber yang jelas dan valid" (pekerja lepas, laki-laki, daerah tidak rawan miskin, Jakarta Barat) dan "merupakan jalur yang paling bisa dibilang valid karena melalui proses penyaringan dan *editing*, sehingga tidak sembarangan" (karyawan swasta, laki-laki, daerah tidak rawan miskin, Jakarta Barat).

Secara umum, riset ini menemukan beberapa faktor yang menjadi penentu kepercayaan responden terhadap jenis media yakni ketersediaan *gatekeeper* dan kredibilitas informasi (sumber resmi atau sumber pertama yang mengalami peristiwa). Dua hal ini menjadi parameter dari *platform* yang bisa dan tidak bisa dipercaya. Misalnya, mereka yang percaya dan tidak percaya pada media sosial menggunakan parameter yang sama: kredibilitas informasi. Mereka yang tidak percaya cenderung melihat media sosial sebagai *platform* besar yang di dalamnya memuat banyak informasi yang tidak kredibel, sementara mereka yang percaya cenderung melihatnya dalam konteks yang lebih mikro (akun tertentu).

Dalam konteks yang kurang lebih sama, pandangan terhadap saluran komunikasi di tingkat RT juga dipahami oleh responden. Ketidakpercayaan pada saluran komunikasi di tingkat RT umumnya disebabkan oleh ketidakpercayaan pada kredibilitas penyampai informasi. Penyampai informasi dalam hal ini umumnya mengacu kepada sesama warga dalam grup yang sama, meski tidak jarang

juga dialamatkan kepada pejabat lokal. Salah seorang responden mengatakan "informasi di grup WA RT bentuk tulisannya tanpa referensi yang jelas dan mengatasnamakan dokter yang tidak jelas" (guru, perempuan, daerah tidak rawan miskin, Jakarta Barat). Kredibilitas juga jadi parameter mereka yang percaya sebagaimana mengemuka dari pengakuan berikut: "karena informasinya meneruskan dari pemerintah di atasnya, baik dari RW atau kelurahan" (karyawan swasta, laki-laki, daerah rawan miskin, Jakarta Barat).

Adapun parameter yang unik dari kepercayaan pada saluran di tingkat RT adalah "kedekatan". Dalam hal ini, kedekatan didefinisikan sebagai "karena dekat rumah jadi ketika dievakuasi (warga yang terpapar Covid-19) terlihat" (karyawan swasta, perempuan, daerah rawan kemiskinan, Jakarta Barat). Selain geografis, makna lain dari kedekatan adalah juga kedekatan emosional terhadap penyampai informasi, sebagaimana terlihat dari pernyataan berikut: "lebih percaya sama mamah, soalnya mamahkan aktif di RT dan suka cari-cari info soal pandemi. Mamah sih yang lebih tau" (karyawan swasta, perempuan, daerah tidak rawan miskin, Jakarta Timur).

### Kepercayaan pada Saluran Komunikasi RT

Untuk memahami lebih jauh pola komunikasi responden di tingkat RT, kami bertanya bentuk komunikasi seperti apa yang lebih dipercaya oleh responden. Hasilnya, kami menemukan interaksi langsung (tatap muka) menjadi model komunikasi yang paling dipercaya oleh responden.

SALURAN KOMUNIKASI RT TERPERCAYA, BERDASARKAN EKONOMI DAERAH

Saluran Komunikasi RT	Rawan kemiskinan	Tidak rawan kemiskinan
Interaksi langsung	50%	36%
Grup WhatsApp	13%	36%
Pengumuman luring	12%	7%
Tidak mengakses	10%	6%
Tidak tahu	9%	9%
Percaya semua	5%	3%
Aplikasi (JAKI, CARIK, dll)	1%	3%
Total	100	100

Dalam sesi FGD, terungkap bahwa interaksi langsung dibutuhkan oleh responden guna mengakses informasi yang sifatnya lokal, semisal prosedur penerima bansos atau buka tutup wilayah sesuai dengan kebijakan PPKM.

Tapi, untuk informasi-informasi yang lainnya mungkin seputar bansos, seputar peraturan apa, penutupan portal segala macam, pelarangan masjid dibuka atau segala macam. Itu terlaksana benar-benar seperti itu. Karena mereka punya andil langsung seperti itu. Itu yang bisa dipercaya untuk penutupan portal dan tempat ibadah itu bisa dipercaya karena tertutup kan banyak. (Wirausaha, laki-laki, daerah tidak rawan miskin, Jakarta Pusat)

Temuan ini bertaut dengan dua hal lainnya dalam laporan ini. Pertama, pasokan informasi media berbingkai makro. Kedua, minimnya akses terhadap situs dan aplikasi resmi pemerintah seperti JAKI, CARIK, dll. Kedua hal ini mendorong masyarakat untuk menggunakan model komunikasi yang lebih "langsung" guna mengakses ataupun mengonfirmasi kebenaran sebuah informasi.

Meski penetrasi internet di Indonesia per 2020 telah mencapai 73,3% (Kominfo, 2020) dan Jakarta merupakan salah satu kota dengan penetrasi internet terluas, Indonesia secara umum tetap memelihara budaya komunikasi oral (Farida RWD, Nanda Julian Utama, Rosmaida Sinaga, 2018).

Komunikasi oral membutuhkan kehadiran fisik karena makna dibentuk tak hanya oleh kata melainkan juga intonasi dan gestur nonverbal (Heryanto, 2015). Dalam hal ini, kedekatan menjadi penting, baik fisik maupun emosional. Kedekatan menjadi faktor yang turut menentukan kesepahaman dan kepercayaan dalam proses komunikasi. Dalam bahasa salah seorang responden kala menjawab mengapa ia percaya dengan interaksi langsung, "Kalau interaksi langsung bisa menilai apakah orang yang berbicara sedang berbohong, bercanda, atau serius" (karyawan swasta, laki-laki, daerah tidak rawan miskin, Jakarta Pusat).

Perbedaan yang menarik adalah di antara warga rawan miskin kepercayaan terhadap bentuk komunikasi "interaksi langsung" sangat dominan, sementara di antara warga tidak rawan miskin, "interaksi langsung" dan "grup WA RT" sama-sama dipercaya. Studi yang dilakukan oleh Jaeho Cho (2003) menemukan status ekonomi memiliki pengaruh terhadap tingkat literasi digital. Kelompok ekonomi menengah dan menengah atas bukan cuma memiliki latar belakang pendidikan yang memadai untuk mengakses internet melainkan juga punya motivasi lebih untuk mengutilisasi internet demi memenuhi kebutuhan mereka.

The data suggest that the subgroup including those who are young and high in socioeconomic status are most likely to use the Internet to strategically satisfy their motivations and to gain the desired gratifications. (Jaeho Cho, 2003)

Dalam riset ini, motivasi tersebut antara lain adalah kemudahan akses dan kesehatan. Warga dari kelompok ekonomi "tidak rawan miskin" menyebut alasan mempercayai grup WhatsApp yakni "hanya grup WA yang mudah diakses" (karyawan swasta, laki-laki, daerah tidak rawan miskin, Jakarta Barat). Selain akses yang mudah, alasan yang juga mengemuka adalah komunikasi melalui grup WhatsApp lebih mungkin dilakukan tanpa harus melanggar protokol kesehatan (bertemu tatap muka).

## Pengaruh

### Persepsi Keterbukaan dan Kinerja Pemerintah

Secara umum, sebagian besar responden menganggap pemerintah terbuka terhadap informasi mengenai pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Persepsipositifini terutama tertuju pada komunikasi pemerintah terkait sektor kesehatan dengan 86,5% responden menganggap pemerintah sangat atau cukup terbuka. Persepsi negatif mengenai transparansi pemerintah yang paling tinggi tertuju pada komunikasi di isu ekonomi dengan 37,5% responden menganggap informasinya kurang atau tidak terbuka. Responden perempuan cenderung memiliki persepsi negatif mengenai keterbukaan pemerintah ketimbang lakilaki. Variabel ekonomi daerah tidak berpengaruh terhadap persepsi mengenai keterbukaan.

Menariknya, persepsi atas transparansi pemerintah ini tidak dibentuk oleh seberapa akuntabel atau terbuka pemerintah terhadap informasi publik seputar pandemi. Dalam FGD, kami menanyakan pada partisipan mengenai pengelolaan anggaran untuk penanganan Covid-19. Jawaban yang muncul dari partisipan berkisar pada berapa nominal bantuan yang diberikan untuk setiap warga dari program-program bansos. Dengan demikian, transparansi dipahami subjek penelitian sebagai seberapa mudah mereka memahami dan dapat mengakses kebijakan bantuan sosial di setiap bidang.

### PERSEPSI TRANSPARANSI PEMERINTAH

Persepsi	Pendidikan	Kesehatan	Ekonomi
Sangat terbuka	25%	50%	21%
Cukup terbuka	44,5%	36,5%	41,5%
Kurang terbuka	23,5%	11,5%	27%
Tidak terbuka	7%	2%	10,5%
Total responden	200	200	200

### PERSEPSI TRANSPARANSI BANTUAN PEMERINTAH BERDASARKAN GENDER

Persepsi	Pend	didikan	Kes	ehatan	Eko	onomi
reisepsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Sangat terbuka	28,28%	22%	53,54%	46%	24,24%	17%
Cukup terbuka	48,48%	41%	36,36%	37%	44,44%	39%
Kurang terbuka	19,19%	28%	10,10%	13%	25,25%	29%
Tidak terbuka	4,04%	9%	0%	4%	6,06%	15%
Total responden	99	100	99	100	99	100

Di sisi lain, kendati pemerintah gencar mengupayakan pemulihan ekonomi, sebagian besar responden menilai pemerintah kurang atau tidak berhasil dalam hal ini (68%). Dalam isu kesehatan, mayoritas responden menilai kinerja pemerintah sangat atau cukup berhasil (60,5%). Persepsi responden mengenai kinerja pemerintah di bidang pendidikan terbagi merata (50% responden menilai sangat dan cukup berhasil, 50% menilai kurang dan tidak berhasil). Responden yang tinggal di daerah rawan kemiskinan dan laki-laki cenderung menilai negatif kinerja pemerintah di bidang pendidikan.

Kualitas pelayananan dan implementasi dalam sektor pendidikan berbeda-beda di setiap tempat. Beberapa RT menyatakan tidak mendapatkan kendala, sementara RT lain mengalaminya. Masalah ini terutama terjadi dalam hal penyaluran tidak tepat sasaran atau tidak memiliki mekanisme jelas. Di wilayah rawan miskin Jakarta Barat, misalnya, akses bantuan internet gratis dari JakWIFI menjadi salah satu sorotan peserta FGD. Dari seluruh peserta, hanya satu orang yang dapat mengaksesnya karena tiang akses terlalu jauh dari rumah warga. Penempatan tiang akses di tengah jalan dengan jangkauan akses yang sempit memaksa warga tetap perlu memasang WiFi secara mandiri di rumah masing-masing. Selain bantuan dari pemerintah daerah, bantuan yang disalurkan oleh institusi pendidikan pun dinilai tidak jelas alurnya, alhasil warga memilih untuk tidak mengandalkan bantuan.

Sejauh ini sih saya belum tahu info itu ya. Kalau dari kampus saya sendiri, mereka cuma minta data. Karena kuotanya sedikit, jadi kayak cepat-cepatan begitu, siapa cepat dia dapat. Terus sampai sekarang juga belum ada info lagi, sejak dimintai data di bulan Mei atau Juni kalau tidak salah. Menurut saya alurnya tidak jelas sih. Kayaknya juga info dari internet juga belum pasti, jadi kayak percuma saya cari. Sia-sia juga. (Mahasiswa, perempuan, tidak rawan miskin, Jakarta Barat)

### PERSEPSI KINERJA PEMERINTAH

Persepsi	Pendidikan	Kesehatan	Ekonomi
Sangat berhasil	10,5%	9,5%	5%
Cukup berhasil	39,5%	51%	27%
Kurang berhasil	41%	32,5%	51,5%
Tidak berhasil	9%	7%	16,5%
Total responden	200	200	200

PERSEPSI KINERJA PEMERINTAH DI BIDANG PENDIDIKAN

	Berdasarkan Ekonomi Daerah		Berdasarkan Gender	
Persepsi	Rawan kemiskinan	Tidak rawan kemiskinan	Laki-laki	Perempuan
Sangat berhasil	13%	8%	11,11%	9%
Cukup berhasil	32%	47%	35,35%	44%
Kurang berhasil	42%	40%	45,45%	37%
Tidak berhasil	13%	5%	8%	9%
Total responden	100	100	99	100

### **Otoritas yang Diikuti**

Pemerintah pusat adalah pihak yang memiliki pengaruh besar dalam mempengaruhi perilaku warga. Dalam survei, 40% responden menyatakan bahwa anjuran pemerintah pusat adalah anjuran yang paling diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehubungan dengan pandemi. Pemprov DKI Jakarta berada di urutan ketiga (15%) setelah RT/RW (22%). Pola kepatuhan pada anjuran otoritas ini berlaku untuk seluruh variabel responden, baik ekonomi daerah maupun gender.

# ANJURAN MENGENAI PANDEMI DARI PIHAK MANAKAH YANG ANDA TERAPKAN?

Pemerintah pusat	40%
RW/RT	22%
Pemerintah Kota DKI Jakarta	15%
Tenaga kesehatan	11%
Tokoh agama	3,5%
Keluarga	2,5%
Lainnya	6%
Total	200

Tingginya kepatuhan pada pemerintah pusat ini muncul karena anggapan komando terkait pandemi berlaku secara hierarkis. Dalam hampir setiap sesi FGD, partisipan menganggap bahwa arus kebijakan mengalir dari atas ke bawah. Pemerintah pusat memutuskan kebijakan dan jenjang di bawahnya meneruskan kebijakan tersebut sampai ke level komunitas warga. Oleh karena itulah, kepatuhan pada pemerintah pusat tinggi: partisipan memilih untuk memegang komando yang paling tinggi.

Menariknya, kepatuhan pada kepala RT/RW lebih tinggi dari Pemprov DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa warga lebih memilih untuk bergantung pada otoritas dalam komunitas warga ketimbang provinsi dalam mendapatkan kebutuhan informasi praktis terkait pandemi.

Terpusatnya kepatuhan pada pemerintah pusat ini memiliki masalahnya tersendiri. Partisipan FGD pun menyadari bahwa kerap terjadi kekacauan dalam rantai informasi dan kebijakan dari pusat. Kekacauan ini terjadi dalam tiga bentuk. Pertama, tumpang tindih wewenang setiap level pemerintahan. Partisipan FGD menggarisbawahi buruknya koordinasi antarjenjang pemerintahan, sehingga warga kebingungan

dalam menerapkan kebijakan. Hal ini tergambar dalam kutipan berikut:

Misalkan aku mau pergi ke store nih mau beli sesuatu. Kata pemerintah pusat, "oh iya gak papa, store-nya sudah dibuka." Tapi pas aku ke sana, ternyata belum. Di situ tulisannya, informasi ini didapat dari pemerintah daerah. Jadi kadang emang pemerataan informasi ini yang kadang bikin bingung juga sih menurut aku. Pemerintah pusat bilang A, tapi ternyata seharusnya pemerintah daerahlah yang harus diikutin. (Mahasiswa, perempuan, tidak rawan miskin Jakarta Utara)

Bentuk kedua adalah kontradiksi antarkebijakan. Hal ini terjadi ketika suatu kebijakan memiliki dampak yang bertentangan dengan anjuran atau kebijakan lain. Dalam penerapan kewajiban vaksin, misalnya, fasilitas kesehatan menjadi sangat penuh dengan antrian warga yang hendak vaksin. Salah seorang partisipan menggarisbawahi pelaksanaan kebijakan vaksinasi yang bertentangan dengan penjarakan sosial:

Aku lebih takutnya, kan kemarin pas vaksin ngantri banyak orang. Ya mungkin itu sih, orang yang harusnya social distancing tapi karena banyak banget ya... [tidak bisa]. (Mahasiswa, perempuan, tidak rawan miskin, Jakarta Barat)

Bentuk ketiga adalah kurang beredarnya informasi otoritatif yang menjawab kebingungan warga. Tidak terjawabnya pertanyaan dan keraguan warga menimbulkan spekulasi dan membuat warga enggan menerapkan kebijakan yang berguna bagi hajat hidupnya. Hal ini tergambar dari partisipan yang enggan divaksin:

Ada yang habis vaksin langsung is dead gitu kan. Demam 2-3 hari langsung is dead. Nah, sampai sekarang itu berita kematiannya nggak tahu kenapa. Nah, itu awalawalnya lebih mengerikan gitu. Masa kita kena suntik aja ya langsung is dead. Tapi karena dapat notif dari ojol kayak gitu ya mau nggak mau kita harus ngikut [vaksin]. (Pengemudi ojol, laki-laki, rawan miskin, Jakarta Timur)

Kebingungan akibat tidak adanya informasi yang berkualitas ini merupakan celah yang diambil oleh tokoh atau kanal yang "kritis" terhadap keberadaan Covid-19 seperti Mardigu Wowiek, dr. Lois, atau Flat Earth 101. Melalui tokoh-tokoh ini, berbagai teori konspirasi beredar. Dalam survei kami, terdapat 13% responden yang menyatakan bahwa mereka menerapkan anjuran dari tokoh-tokoh ini.

### APAKAH ANDA MENERAPKAN ANJURAN DARI TOKOH-TOKOH YANG "KRITIS" TERHADAP COVID-19?

Tidak	87%
Ya	13%
Total responden	200

### KEPATUHAN PADA TOKOH "KRITIS" TERHADAP COVID-19 BERDASARKAN EKONOMI DAERAH

Rawan kemiskinan	61,5%	
Tidak rawan kemiskinan	38,4%	
Total responden	26	

Meski terbilang kecil, kepercayaan ini membawa masalah tersendiri bagi penanganan pandemi, misalnya adanya penolakan vaksin atau penerapan protokol kesehatan.

Enggak mau vaksin. Aduh saya bahasnya dari mana ya. Saya intinya pecinta teori konspirasi, saya memang tidak percaya dengan hal-hal seperti itu [vaksin]. Terus terang, ini by design, termasuk vaksin itu, menurut saya itu ya bisnis. (Mahasiswa, laki-laki, daerah rawan miskin, Jakarta Pusat)

Berita-berita di TV itu loh, yang sekiranya yang melonjak, dinaikkan [angkanya] gitu. Itu saya tahunya dari TV dan dari tetangga setempat sih. Warga yang sekiranya mereka yang kena, saya juga enggak ada ketakutan sama sekali gitu. Saya justru saat ada yang kena, interaksi, justru kita ngobrol bareng gitu. (Sopir ojol, lakilaki, daerah rawan miskin, Jakarta Pusat)

### Menyampaikan Kebutuhan pada Pemerintah

Ketika ditanya apakah responden pernah menyampaikan kebutuhannya pada pemerintah (baik pusat, daerah, atau lokal), hanya 34% yang menjawab "ya". Tidak ada variasi signifikan dalam variabel gender dan ekonomi daerah.

# APAKAH ANDA PERNAH MENYAMPAIKAN KEBUTUHAN ANDA KEPADA PEMERINTAH?

Tidak	66%
Ya	34%
Total responden	200

Responden tidak menyampaikan kebutuhan pada pemerintah karena sejumlah alasan. Yang paling banyak disebut responden adalah tidak memiliki keperluan atau bahwa keperluannya sudah terpenuhi (42,94%). Bagi responden yang memang memiliki keperluan, hambatan terbesar yang mereka temukan adalah tidak mengetahui cara menyampaikan

kebutuhan (23,48%), tidak yakin akan ditanggapi (10,61%), dan takut mengalami hal buruk (4,55%).

Meski kecil persentasenya, alasan takut mengalami hal buruk ini berhubungan dengan tindakan represif pemerintah dalam menanggapi kritik warga. Responden, misalnya, menyatakan bahwa ia "takut menyampaikan karena khawatir ditangkap polisi ketika salah bicara" (SPG, perempuan, daerah tidak rawan kemiskinan, Jakarta Pusat). Ada juga yang berkomentar, "masalahnya kan saya nggak bisa menyampaikan. Mereka kan petinggi gitu. Saya ngga bisa sembarangan ngomong ke mereka" (pengemudi ojek daring, laki-laki, daerah rawan kemiskinan, Jakarta Selatan). Sementara itu, variabel gender dan ekonomi daerah tidak menghasilkan variasi temuan yang signifikan.

# ALASAN TIDAK MENYAMPAIKAN KEBUTUHAN PADA PEMERINTAH

Tidak ada keperluan/sudah terpenuhi	43,94%
Tidak mengetahui caranya	23,48%
Tidak yakin akan ditanggapi	10,61%
Tidak memberi alasan khusus	5,30%
Takut mengalami hal buruk	4,55%
Sibuk	3,79%
Tidak terpikirkan	3,03%
Lainnya	3,03%
Tidak mau menjawab	2,27%
Responden yang tidak pernah 132 menyampaikan kebutuhannya	

Jika disandingkan dengan besarnya kepatuhan pada anjuran pemerintah pusat, temuan ini menunjukkan bahwa pola komunikasi

seputar penanganan pandemi bersifat satu arah dan *top down*. Mekanisme untuk menjaring partisipasi masyarakat dalam perumusan dan penerapan kebijakan tidak berjalan dengan baik. Hal ini berujung perumusan dan penerapan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Salah satu ilustrasinya adalah pendataan bantuan sosial sebagaimana mengemuka pada pandangan berikut:

Jadi, beberapa warga yang dinilai berkecukupan itu biasanya enggak dimasukin datanya. Kira-kira, "wah ini kayaknya orang enggak perlu ini [bantuan]". Padahal siapa yang tahu dia perlu apa enggak. Kan harusnya petugas datang, terus ditanyain pendapatan Anda berapa, segala macam. Jadi, dari situ bisa ketahuan nih, si ini dapat atau enggak. tapi kalau kemarin cuma sekadar status saja, status PNS atau bukan. Cuma dari RT, karena ada beberapa yang enggak dapat, diakalin itu. Jadi jumlahnya dikurangin, dibagi-bagi, sehingga semua warganya dapat. (Tidak bekerja, laki-laki, rawan kemiskinan, Jakarta Timur)

### Adopsi Platform Digital Pemerintah sebagai Sumber Informasi

Baik pemerintah pusat maupun Pemprov DKI Jakarta mengandalkan beragam *platform* digital (situs web dan aplikasi) untuk menyebar informasi seputar pandemi. Namun, hanya 1,5% responden yang menggunakannya untuk mendapatkan informasi seputar pandemi (lihat bab "Akses Media") dan 3% yang percaya pada *platform-platform* tersebut (lihat bab "Kepercayaan pada *Platform* Media").

Penting dicatat bahwa penelitian lapangan dilakukan dari Mei hingga Agustus 2021 yakni sebelum aplikasi PeduliLindungi diluncurkan. Temuan ini dapat berubah jika memasukkan kebijakan pemerintah yang mewajibkan warga memakai aplikasi PeduliLindungi ketika melakukan

perjalanan, mengunduh sertifikat vaksin, dan memasuki tempat usaha.

Rendahnya penggunaan dan kepercayaan terhadap aplikasi ini konsisten dengan rendahnya jumlah unduhan aplikasi-aplikasi buatan pemerintah di Google Store. Dari aplikasi-aplikasi yang kami pantau, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, hanya PeduliLindungi buatan Kemkominfo dan JAKI buatan Pemprov DKI Jakarta yang unduhannya melebihi angka satu juta.

Menariknya, JAKI, yang dibuat untuk warga Jakarta dan memiliki fitur yang berguna untuk mengakses bantuan (untuk pendaftaran vaksin dan pengecekan data penerima bantuan), tidak menjadi pilihan warga dalam mengakses informasi. Salah satu kemungkinan untuk menjelaskan hal ini adalah kurang baiknya promosi aplikasi ini untuk penanganan Covid-19 di Jakarta. Hal ini bisa dilihat, misalnya, dari rendahnya pemanfaatan JAKI dalam sistem distribusi bantuan maupun vaksin di level kelurahan, RW, dan RT dalam komunitas-komunitas yang kami teliti.

Selain promosi, JAKI juga memiliki masalah dalam koordinasi antarinstansi Pemprov DKI Jakarta. Pada Juli 2021, misalnya, akun @Niiken\_Purnama melaporkan pengalaman buruknya dengan JAKI melalui Twitter: "Ngelaporin orang2 depan rumah ga pake masker & nongkrong, ke RT ga mempan. Akhirnya lapor via Jaki @DKIJakarta, udah disantronin satpol PP eh malah disebut nama pelapor. Gila gila malah gw kena *bully*, bobrok amat sistemnya" (Kompas.com, 2021).

Secara umum, *platform* digital pemerintah untuk pelayanan publik seputar Covid-19 pun tak lepas dari masalah koordinasi ini. *Platform* digital untuk pendaftaran vaksin, misalnya, tidak memberi kepastian dan kemudahan dalam penjadwalan vaksin (VOAIndonesia.com, 2021). Dalam hal pelayanan vaksin untuk lansia, sistem daring yang disediakan Kemenkes memiliki mekanisme yang membingungkan dan tidak efektif (Detik.com, 2021).

### **JUMLAH UNDUHAN APLIKASI PANDEMI RESMI**

Pemerintah	Aplikasi	Inisiator	Unduhan
Pemerintah Pusat	PeduliLindungi	Kemkominfo	10M+
	10 Rumah Aman	KSP	100K+
	Bersatu Lawan COVID-19	KCPEN	100K+
	SIRANAP RS	Kemenkes	50K+
Pemerintah Daerah	JAKI	Pemprov DKI Jakarta	1M+
	PIKOBAR	Pemprov Jawa Barat	500K+
	PUSICOV	Kota Bandung	5K+
	Cared+	Pemprov DI Yogyakarta	1K+
	PaPa Sulbar	Pemprov Sulawesi Barat	1K+
	Sawarna	Kabupaten Bandung	1K+

<sup>\*</sup> Data diambil dari perhitungan Google Store pada 10 Oktober 2021

Ketika ditanya alasan mempercayai suatu *platform* media sosial dalam kolom isian survei, terdapat 8,5% responden yang menyatakan "adanya *verified account* pemerintah" sebagai alasan utama. Hal ini terutama terjadi pada responden yang memilih Instagram sebagai *platform* media sosial terpercaya. Hal ini berarti media sosial, terutama Instagram, tampaknya merupakan *platform* digital yang sedikit lebih efektif bagi pemerintah dalam menjangkau warga ketimbang aplikasi *mobile*.

Hambatan utama dalam komunikasi pemerintah melalui media sosial ini adalah tersebarnya komunikasi seputar Covid-19 pada berbagai macam akun (lihat bab "Solusi Digital yang Terfragmentasi"). Oleh karenanya, warga pun mengikuti akun pemerintah yang berbeda-beda mulai dari Kementerian Kesehatan, Pemprov DKI Jakarta, hingga akun pejabat seperti Presiden Joko Widodo atau Menteri Luhut. Menariknya, tak

ada responden yang menyebutkan akun resmi khusus Covid-19 seperti @lawancovid\_idataukolaborasikampanye KCPEN dengan Kemkominfo, @mulaidarikamu\_id.

# Kesimpulan & Rekomendasi



# Kesimpulan dan Rekomendasi

# Kesimpulan

Berdasarkan data lapangan, kami menemukan tiga kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan informasi warga. Kesenjangan-kesenjangan tersebut terjadi di sektor-sektor kebutuhan dasar warga: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Kesenjangan pertama terkait kebutuhan informasi praktis untuk mengakses bantuan di masa pandemi. Kesenjangan kedua berhubungan dengan kesulitan warga mendapat informasi praktis tersebut meskipun mereka telah mencarinya di saluran komunikasi tingkat RT. Kesenjangan ketiga berkaitan erat dengan kesenjangan yang terjadi antardaerah rawan kemiskinan dan tidak rawan kemiskinan.

### Persepsi Kinerja dan Transparansi

- Persepsi warga mengenai kinerja dan transparansi pemerintah terkait pandemi di sektor ekonomi dan pendidikan rendah.
- Warga lebih memahami transparansi sebagai kejelasan mekanisme kebijakan pemerintah ketimbang akuntabilitas kinerja secara umum.
- Rendahnya persepsi mengenai kinerja dan transparansi pemerintah muncul karena warga kesulitan mengakses informasi terkait kebijakan pemerintah mengenai pandemi, baik bantuan sosial, pembatasan sosial dan operasional usaha, atau rencana belajarmengajar luring.

### Kesenjangan antarinstitusi Pemerintah

- Dalam beberapa kasus, informasi yang disampaikan oleh pemerintah pusat justru menimbulkan kesulitan di tingkat kelurahan, terutama dalam pelaksanaan kebijakan. Pihak kelurahan secara spesifik mengatakan kalau terlalu banyak peraturan mengenai pandemi, yang pada akhirnya justru membuat pihak kelurahan kebingungan dalam mengimplementasikannya.
- Terdapat ketidakkonsistenan dalam kebijakan dan komunikasinya sehingga menimbulkan kebingungan warga. Salah satu contohnya adalah perbedaan aturan pembatasan operasional mal dan usaha lainnya yang berbeda antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta.

### Solusi Digital yang Tidak Tepat Guna

- Pengembangan solusi digital pemerintah cenderung tidak berangkat dari masalah dan kebutuhan. Dalam pemerintah pusat, ini terlihat dalam pola pengembangan aplikasi yang diinisiasi instansi tertentu melalui kerja sama dengan Kemkominfo. Indikasi lain adalah rendahnya kepercayaan terhadap aplikasi pemerintah (3%) dan unduhan aplikasi (selain PeduliLindungi, tidak ada aplikasi pemerintah pusat yang mencapai satu juta unduhan di Google Store).
- Pemprov DKI Jakarta mengintegrasikan solusi digital terkait pandemi dengan aplikasi yang sudah ada (JAKI). Fitur dari aplikasi ini berpotensi menjawab kebutuhan informasi warga dalam mengakses kebijakan seperti pengecekan penerima bantuan sosial atau pendaftaran vaksin. Namun, hal ini tidak berpengaruh pada kepercayaan (3%) atau penggunaan (1,5%) dari aplikasi pemerintah. Salah dua kemungkinan penyebabnya adalah rendahnya promosi dan pemanfaatan aplikasi di tingkat kelurahan, RW, dan RT, serta

lemahnya koordinasi di lingkungan pemerintahan.

Dibandingkan aplikasi, Instagram merupakan platform yang lebih efektif bagi pemerintah untuk menjangkau warga dengan 8,5% penggunamedia sosial yang mempercayai informasi dari media sosial terutama Instagram karena "adanya verified account pemerintah". Meski demikian, akun media sosial yang disebut responden adalah akun resmi kementerian, Pemprov DKI Jakarta, atau individu pejabat seperti Presiden Joko Widodo atau Luhut Binsar Panjaitan. Responden tidak menyebut akun resmi pemerintah terkait pandemi seperti akun resmi KCPEN atau kampanye @mulaidarikamu\_id.

### Agenda Setting Media Tidak Bertemu dengan Harapan Warga

- Penelitian ini menemukan bahwa sentralisasi media yang berpusat di Jakarta berdampak pada liputan media yang dominan mengangkat topik-topik yang berasal dari Jakarta. Dibandingkan dengan daerah selain Jakarta, berita-berita yang berasal dari Jakarta juga memiliki dimensi pemberitaan lokal yang lebih dominan. Dengan kata lain, media nasional sangat "melayani" warga Jakarta.
- Secara khusus, efek sentralisasi terasa lebih kuat di media daring. Hal ini ditandai oleh ketimpangan porsi berita Jakarta dengan berita dari luar jakarta yang jauh lebih besar di media daring ketimbang televisi (lihat tabel "Daerah Asal Berita Daring"). Pola produksi berita daring patut diduga menyumbang pada ketimpangan ini. Produksi berita harian yang membutuhkan waktu cepat dan dalam volume besar melahirkan fokus peliputan yang Jakarta sentris. Dalam logika ekonomi, praktik ini masuk akal sebab biaya produksi meliput berita di Jakarta lebih murah.
- Topik paling dominan diangkat oleh media di semester pertama tahun 2021 (Januari-Juni) adalah vaksinasi. Setara dengan temuan umum yang menunjukkan bahwa isu kesehatan mendominasi, topik

kesehatan juga mendominasi berita asal Jakarta. Dalam konteks televisi, topik vaksin mendominasi, sementara di media daring terdapat dua topik yang menjadi perhatian media yakni vaksin dan PPKM.

Pasokan informasi media sebagaimana ditemukan dalam analisis isi tidak berbanding lurus dengan kebutuhan informasi warga dari media. Sebagaimana terungkap melalui survei dan FGD, informasi yang paling dibutuhkan warga terkait isu ekonomi. Bahkan, dalam isu terkait bidang pendidikan dan kesehatan sekalipun, aspek ekonomi mengemuka. Hal ini, misalnya, bisa dilihat dari kebutuhan warga akan informasi terkait PPKM, umumnya berkaitan erat dengan bagaimana cara bekerja atau berusaha dalam pembatasan sosial. Begitu juga halnya dengan obat. Salah satu aspek yang dikeluhkan warga adalah bagaimana mengakses obat gratis dari Puskesmas. Hal yang sama bisa kita temukan dari keluhan mengenai minimnya informasi mengenai cara mengakses kuota internet untuk pendidikan.

### Kebutuhan Informasi Praktis di Tiga Sektor

- Warga kesulitan untuk memahami bagaimana cara mengakses bantuan. Data lapangan kami memperlihatkan kalau informasi di media massa dipenuhi oleh informasi mengenai kesehatan. Namun demikian, di tingkat RT, warga masih membutuhkan informasi mengenai pembatasan kegiatan masyarakat, vaksinasi, dan akses terhadap obat-obatan. FGD kami mengungkap lebih dalam bahwa warga ingin mengetahui informasi terkait obat-obatan yang ampuh terhadap virus Covid-19.
- Di sektor ekonomi, warga masih membutuhkan informasi praktis terkait kartu prakerja dan bantuan langsung tunai. FGD kami mengungkap bahwa warga mengeluhkan informasi mengenai

bantuan yang datang tidak menentu. Mereka merasa bahwa ada ketidakjelasan mengapa waktu datangnya bantuan bisa berbedabeda yang berdampak pada bagaimana mereka merencanakan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Di sektor pendidikan, rencana belajar luring dan bantuan kuota pulsa merupakan dua isu yang banyak disuarakan oleh warga. Masyarakat membutuhkan kejelasan informasi mengenai kapan sekolah tatap muka dimulai. FGD kami menguraikan keresahan orang tua yang mengalami kesulitan untuk membantu anakanaknya dalam pembelajaran daring. Pembelajaran daring juga memunculkan kebutuhan warga untuk mengetahui bagaimana cara mengakses bantuan kuota untuk pembelajaran daring anak mereka.

# Kesenjangan antarwilayah dan Gender dalam Saluran Komunikasi Tingkat RT

- Warga di wilayah rawan miskin tidak terlalu membutuhkan informasi terkait PPKM sementara warga di wilayah tidak rawan miskin justru cukup membutuhkannya.
- Warga di wilayah rawan miskin lebih membutuhkan informasi tentang testing dan tracing dibandingkan warga di wilayah tidak rawan miskin.
- Di sektor pendidikan, warga di daerah rawan miskin jauh lebih membutuhkan informasi mengenai WiFi gratis dibandingkan warga di wilayah tidak rawan miskin. Sementara itu, warga di wilayah tidak rawan miskin justru lebih membutuhkan informasi mengenai belajar tatap muka dibanding warga di wilayah rawan miskin.
- Perbedaan yang disebabkan variabel gender paling mencolok ada di sektor pendidikan. Responden laki-laki lebih membutuhkan informasi terkait akses WiFi gratis dibandingkan perempuan. Laki-

laki juga jauh lebih membutuhkan informasi dari saluran di tingkat RT mengenai kebijakan ujian sekolah. Sementara itu, perempuan membutuhkan informasi lebih banyak terkait bantuan kuota pulsa dan rencana belajar tatap muka.

# Rekomendasi

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian, kami merekomendasikan hal-hal berikut:

### Rekomendasi Umum

- Perbanyak informasi yang menjawab pertanyaan warga. Pertanyaan seperti, "mengapa ada orang yang meninggal setelah vaksinasi?" atau "kenapa Covid-19 memberi dampak yang berbedabeda pada berbagai jenis orang?" memang terkesan sepele. Namun, jika tidak terjawab, akan menimbulkan keraguan dan memberi ruang bagi berkembangnya teori konspirasi mengenai Covid-19. Untuk memitigasi hal ini, media, pemerintah, maupun masyarakat sipil perlu aktif memproduksi informasi yang menjawab pertanyaan pertanyaan warga seputar Covid-19 dan memastikan informasi tersebut tersebar di berbagai kanal, mulai dari media konvensional, media sosial, hingga aplikasi pesan.
- Evaluasi upaya literasi media dan informasi. Sejak isu hoaks dan misinformasi mulai mengemuka pada 2014, gerakan literasi digital telah digalakkan baik oleh pemerintah, sektor pendidikan, maupun masyarakat sipil. Hari ini, tujuh tahun setelahnya, hoaks dan misinformasi masih menciptakan masalah yang sama. Selain memperbanyak upaya literasi digital, gerakan literasi perlu mengevaluasi aktivitasnya secara menyeluruh untuk memetakan keberhasilan, hambatan, potensi, dan strategi gerakan ke depan.

### **Pemerintah Pusat**

 Kembangkan protokol komunikasi krisis. Sejak awal pandemi, berbagai pejabat pemerintah kerap mengeluarkan pernyataan yang meremehkan pandemi dan tidak empatik terhadap warga terdampak. Protokol komunikasi krisis di kalangan pemerintah memastikan jika Indonesia mengalami krisis atau potensi krisis di masa depan, lingkungan pejabat pemerintahan dapat berkomunikasi dengan seragam, efektif, dan empatik.

- Percepat integrasi sistem manajemen data pandemi secara khusus dan kependudukan secara umum. Manajemen data kasus positif Covid-19 antara pusat dan daerah masih belum terintegrasi. Hanya Provinsi Jawa Tengah yang sudah terintegrasi per Agustus 2021. Hal ini membuat akurasi data kasus Covid-19 berkurang lantaran adanya perbedaan data antara pusat dan daerah. Selain itu, proses penyaluran bantuan pandemi sangat bersandar pada data kependudukan. Kelemahan dalam pengelolaan data kependudukan ini merupakan salah satu faktor dalam penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.
- Kembangkan solusi digital berbasis masalah dan kebutuhan warga, bukan instansi pemerintahan. Aplikasi seperti Bersatu Lawan COVID19 buatan KCPEN dan 10 Rumah Aman buatan KSP tidak menjawab kebutuhan warga dalam mengakses informasi dan kebijakan sehingga kesadaran dan penggunaan warga rendah.
- Pembuatan aturan yang tidak saling bertabrakan. Kami menemukan bahwa perangkat pemerintah di bawah seperti kelurahan mengalami kesulitan dalam menerjemahkan peraturan-peraturan yang kadang bertabrakan seperti kebijakan jam tutup usaha yang dikeluarkan oleh Kemendagri dan Pemprov DKI Jakarta. Kontradiksi ini menyebabkan kebingungan bagi aparat di lapangan dalam memilih peraturan mana yang harus mereka terapkan. Karena itu, pemerintah sebaiknya mengoordinasikan pembuatan peraturan antarinstitusi pemerintah untuk menghindari tumpang tindih dan multitafsir peraturan.

### **Pemprov DKI Jakarta**

- Perkuat adopsi warga terhadap aplikasi pelayanan digital. Meski memiliki potensi dalam menjawab kebutuhan informasi dan akses kebijakan warga, platform JAKI kurang memiliki kontribusi di tengah pandemi. Pemprov DKI Jakarta dapat memanfaatkan jaringan pemerintah di level kelurahan hingga RT untuk menghubungkan kebutuhan warga dengan solusi digital yang tersedia.
- Perkuat infrastruktur dan kapasitas manusia dalam mengelola platform digital. Platform digital DKI Jakarta masih memiliki pekerjaan rumah, baik dari sisi teknologis (fitur, sistem, kesalingterhubungan antar-database) maupun dari sisi kelembagaan (manajemen, koordinasi antarinstansi). Tanpa penguatan dua aspekini, solusi yang hendak dikembangkan melalui platform digital justru berpotensi menjadi sumber kebingungan warga.
- Perkuat kapasitas penyaluran informasi hingga level kelurahan, RT, dan RW. Kelurahan, RT, dan RW merupakan institusi penyampai informasi dan kebijakan kepada warga. Sayangnya, dalam penelitian kami, kelurahan, RT dan RW tidak memiliki kapasitas yang sama dalam menyampaikan informasi kepada warga. Penelitian kami menemukan pihak kelurahan membutuhkan kejelasan aturan dari pemerintah pusat dan tambahan sumber daya untuk mengimplementasikan tugas-tugas penanganan pandemi yang bertumpuk. Sementara itu, RT dan RW membutuhkan literasi media, literasi pandemi, dan literasi kebijakan sangat penting terutama di daerah dengan warga yang memiliki literasi informasi rendah.

### Media

 Media seharusnya mengarahkan agenda pemberitaan mereka untuk menggali kebutuhan praktis warga. Temuan penelitian kami mengungkap bahwa informasi mengenai kebutuhan praktis seperti cara mengakses bantuan sosial menjadi perhatian utama warga. Dengan sulitnya warga mendapatkan informasi praktis mengenai kebutuhan mereka, media dapat membantu menyuarakannya kepada pemerintah pusat. Media televisi maupun daring sebaiknya memproduksi berita yang menginformasikan bagaimana warga dapat mengakses bantuan yang disediakan oleh pemerintah sekaligus menjelaskan konteks mengapa kebutuhan-kebutuhan tersebut muncul.

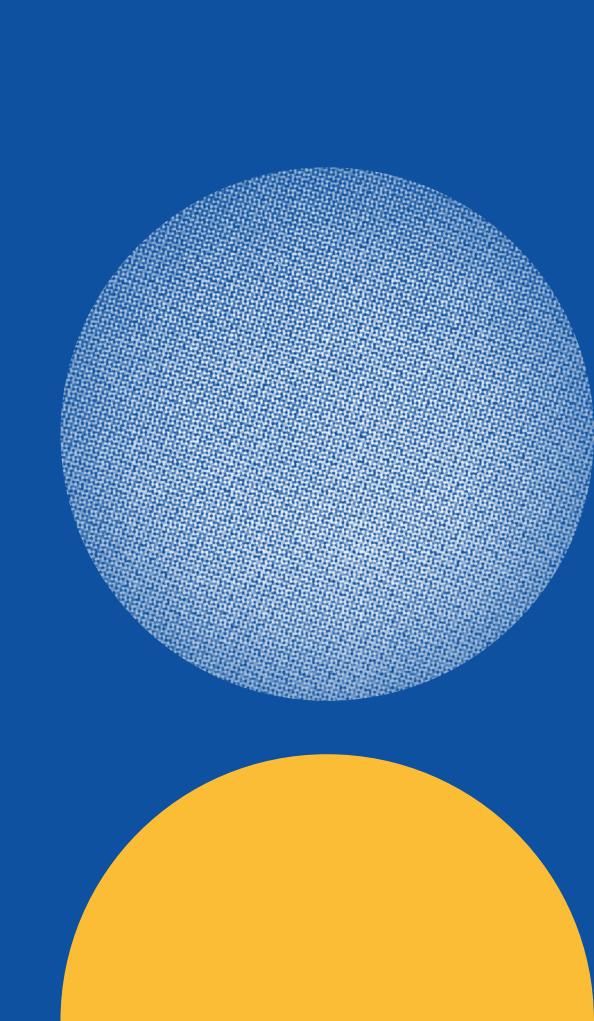
### Masyarakat Sipil

- Perlunya amplifikasi inisiatif masyarakat sipil di bidang bantuan informasi dan sosial, seperti Bagi Rata dan Warga Bantu Warga. Penelitian ini menemukan bahwa berbagai program tersebut kurang dikenali oleh warga Jakarta yang menjadi responden penelitian. Karenanya, kami menilai dibutuhkan sebuah upaya untuk memperluas penerima dampak program-program tersebut. Salah satu caranya adalah membangun kerja sama dengan lembaga negara yang bertanggungjawab di sektor tersebut.
- Perlu peningkatan kesadaran dan partisipasi publik dalam isu akuntabilitas pengelolaan anggaran negara untuk mengatasi pandemi. Penelitian ini menemukan bahwa warga memahami transparansi sebagai kemudahan mengakses informasi terkait bantuan sosial yang diberikan pemerintah. Sedikit perhatian diberikan warga pada akuntabilitas dan kerja pemerintah secara umum. Karenanya, dibutuhkan intervensi yang lebih jauh dalam untuk meningkatkan kesadaran sekaligus partisipasi warga untuk mengawal implementasi program pemerintah terkait pandemi.

### Kajian Lanjutan

- Cakupan penelitian ini terbatas pada analisis untuk memahami kesenjangan antara pasokan dan permintaan informasi seputar kebijakan pemerintah di Jakarta. Potret kesenjangan yang ditunjukkan penelitian ini tidak bisa menggambarkan ekosistem informasi pandemi secara menyeluruh. Beberapa studi lain yang dibutuhkan, misalnya,
  - 1. Kajian yang lebih komprehensif mengenai sistem informasi dan komunikasi di antara instansi pemerintah. Kajian ini juga perlu mencakup bagaimana pola pengembangan dan manajemen solusi digital pemerintah.
  - 2. Kajian serupa dalam lingkup yang lebih luas. Rekomendasi dari penelitian ini tidak bisa diperluas di luar Jakarta. Untuk bisa membangun strategi komunikasi krisis secara nasional, penelitian lanjutan yang mempertimbangkan keragaman demografi dan budaya perlu dilakukan. Dengan begitu, kita akan mampu menyusun strategi komunikasi krisis yang lebih komprehensif.

# Reference Signal



# Referensi

# **Buku dan Jurnal**

Al Farizi, Sofia., dan Bagus Nuari Harmawan. 2020. *Data Transparency and Information Sharing: Coronavirus Prevention Problems in Indonesia*. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia Vol.8 No.1 Special Issue 2020. Doi: 10.20473/jaki.v8i2.2020.35-50

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. 2020. *Indeks Potensi Kerawanan Sosial Provinsi DKI Jakarta 2019.* Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2020. *Hasil sensus Penduduk 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.

Badan Pusat Statistik. 2021. *Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 turun menjadi 10,14 persen*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia

Cho, Jaeho., Homero Gil De Zúñiga, Hernando Rojas, dan Dhavan V. Shah. 2003. *Beyond Access: The Digital Divide and Internet Uses and Gratifications*. It&Society, Volume 1, Issue 4, Spring 2003, Pp. 46-72.

Heychael, Muhamad. 2020. *Politisasi Vaksin di Media: Banyak Janji, Minim Dukungan Ahli.* Jakarta: Remotivi.

Heychael, Muhamad., Holy Rafika, Justito Adiprasetyo & Yovantra Arief. 2021. *Komunitas Agama Marginal dalam Media di Indonesia: Sebuah Kajian Awal.* Jakarta: Remotivi.

Internews. 2020. *Information Ecosystem Methodology*. London: Internews.

Juniarto, Damar. 2020. The Rise of Digital Authoritarian Indonesia Digital Rights Situation Report 2019. Denpasar: SAFEnet.

Morgan, Kimberly J., and Ann Shola Orloff, eds. 2017. *The Many Hands of the State: Theorizing Political Authority and Social Control*. Cambridge: Cambridge University Press.

Newman, Nic., Richard Fletcher, Anne Schulz, Simge Andı, Craig T. Robertson, & Rasmus Kleis Nielsen. 2021. *Reuters Institute: Digital News Report 2021*.

Prasetyo, Yosep Adi & Ahmad Djauhar. 2017. *Mendorong Profesionalisme Pers Melalui Verifikasi Perusahaan Pers*. Jurnal Dewan Pers Edisi 141.

RWD, Farida., Nanda Julian Utama dan Rosmaida Sinaga. 2017. *The Oral Tradition as a Source of Learning The Local History of South Sumatera*. Advances in Social Science, Education and Humanities Research: Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/ice-17.2018.105

Su, Emily Chia-Yu., Cheng-Hsing Hsiao, Yi-Tui Chen & Shih-Heng Yu. 2021. An Examination of COVID-19 Mitigation Efficiency among 23 Countries. Healthcare 9, no. 6: 755. https://doi.org/10.3390/healthcare9060755

Tapsell, Ross. 2017. *Kuasa Media di Indonesia : Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital*. Tangerang: Marjin Kiri.

Thaniago, Roy. 2020. Indeks Media Inklusif 2020: Rapor Jurnalisme Daring dalam Pemberitaan Kelompok Marginal di Indonesia. Jakarta: Remotivi.

Wafi, Rangga Naviul. 2021. *Risma Effect: Eskalasi Pemberitaan Tunawisma di Media*. Jakarta: Remotivi.

World Health Organization. 2020. *COVID-19: Guidelines for communicating about coronavirus disease 2019 - A guide for leaders.* Int: WHO.

# **Laman Web**

Adam, Aulia. "Media 'Nasional' tapi Rasa Jakarta." Tirto, 11 Februari 2018. https://tirto.id/media-nasional-tapi-rasa-jakarta-cEBS

Alika, Rizky. "PPKM Tidak Efektif Jokowi Lakukan Pembatasan Skala Kampung Hingga RT." Katadata, 3 Februari 2021. https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/601a3e0acf023/ppkm-tidak-efektif-jokowi-lakukan-pembatasan-skala-kampung-hingga-rt

Amnesty International. "Segera Revisi UU ITE dan Tegakkan Kebebasan Berekspresi." Amnesty.id, 16 Februari 2021. https://www.amnesty.id/segera-revisi-uu-ite-dan-tegakkan-kebebasan-berekspresi/

Andarningtyas, Natisha. "Kominfo 2020 di Tengah Pandemi Covid-19." Antara News, 29 Desember 2020. https://www.antaranews.com/berita/1918292/kominfo-2020-di-tengah-pandemi-covid-19

Bayu, Dimas Jarot. "LBH Pers: Ada 117 Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis selama 2020." Katadata, 13 Januari 2021. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/13/lbh-pers-ada-117-kasus-kekerasan-terhadap-jurnalis-selama-2020

BBC Indonesia. "Sekolah Tatap Muka: Semester Genap Dimulai, Sejumlah Daerah Memutuskan Terus Gelar Pembelajaran Daring." BBC Indonesia, 4 Januari 2021. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55525851

Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden. "Perpres Nomor 82 Tahun 2020 Untuk Pastikan Keseimbangan Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi." Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, 21 Juli 2020. https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/perpres-nomor-82-tahun-2020-untuk-pastikan-keseimbangan-penanganan-kesehatan-dan-pemulihan-ekonomi/

CBS News. "People don't trust social media-that's a growing problem for businesses." CBS News, 18 Juni 2018. https://www.cbsnews.com/news/edelman-survey-shows-low-trust-in-social-media/

CNN Indonesia. "BPKP: Total Dana Penanganan Corona Rp800 T di 2020." CNN Indonesia, 29 September 2020. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200929155714-532-552319/bpkp-total-dana-penanganan-corona-rp800-t-di-2020

CNN Indonesia. "Dampak Pandemi, Pelajar Butuh 9 Tahun Kejar Ketertinggalan." CNN Indonesia, 28 Mei 2021. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210528111745-20-647783/dampak-pandemi-pelajar-butuh-9-tahun-kejar-ketertinggalan

CNN Indonesia. "Pengguna Internet Kala WFH Corona Meningkat 40 Persen di RI." CNN Indonesia, 9 April 2020. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200408124947-213-491594/pengguna-internet-kala-wfh-corona-meningkat-40-persen-di-ri

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch. 2021. "Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I Tahun 2021." https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%20Semester%20I%20 2021.pdf

Dwiastono, Rivan. "Stok Habis Hingga "Kurang Praktis": Perjuangan Masyarakat Mendapat Vaksin COVID-19." Voa Indonesia, 28 Juli 2021. https://www.voaindonesia.com/a/stok-habis-hingga-kurang-praktis-perjuangan-masyarakat-mendapat-vaksin-covid-19-/5980963.html

eMarketer. "Facebook Losing Younger Users But not all are migrating to Instagram." eMarketer.com, 12 Februari 2018. https://www.emarketer.com/content/facebook-losing-younger-users-at-even-faster-pace

Fajarta, Carlos Roy. "Dampak Pandemi Covid-19, Anies Sebut Ekonomi DKI Jakarta Tertekan." IDX Channel, 19 April 2021. https://www.idxchannel.com/economics/dampak-pandemi-covid-19-anies-sebut-ekonomi-dki-jakarta-tertekan

Hamadeh, Nada., Chaterine V. Rompaey & Eric Metrau. "New World Bank country classifications by income level: 2021-2022." World Bank, 1 Juli 2021. https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-country-classifications-income-level-2021-2022

Husodo, Adnan Topan. "Stagnasi Pemberantasan Korupsi." Antikorupsi. org, 3 November 2010. https://antikorupsi.org/index.php/id/article/stagnasi-pemberantasan-korupsi

Imparsial. "Siaran Pers: 74 Tahun TNI: Stagnasi Reformasi Militer." Imparsial.org, 4 Oktober 2019. https://imparsial.org/74-tahun-tni-stagnasi-reformasi-militer/

Indonesia Corruption Watch. "Policy Brief: Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa Saat Covid-19." ICW, 25 Juni 2020. https://antikorupsi.org/id/article/transparansi-dan-akuntabilitas-pengadaan-barang-dan-jasa-saat-covid-19

Jaringan Pemantauan Penanganan Covid-19 Indonesia Corruption Watch. "Masalah Distribusi Bansos di Tengah Pandemi Covid-19." Antikorupsi.org, 3 September 2020. https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Presentasi%20Hasil%20Pemantauan%20 Bansos.pdf

Kania, Resya, "Kartu Pra-kerja: Ketika Kelompok Kepentingan Terlibat Dalam Solusi Krisis Covid-19." The Conversation Indonesia, April 30, 2020. https://theconversation.com/kartu-prakerja-ketika-kelompok-kepentingan-terlibat-dalam-solusi-krisis-covid-19-137021

Kemp, Simon. 2021. "Digital 2021: Indonesia. Hootsuite and We Are Social." https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia

Kominfo. "Dirjen PPI: Survei Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Bagian Penting dari Transformasi Digital." Kominfo.go.id, 9 November 2020. https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transformasi-digital/0/berita\_satker

Kompas.com. "Penyaluran BLT Simpang Siur." Kompas.com, 22 Mei 2008. https://nasional.kompas.com/read/2008/05/22/19232124/penyaluran.blt.simpang.siur.

Kusnandar, Viva B., "Berapa Jumlah Puskesmas di Indonesia." Katadata, 12 Januari 2020. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/12/berapa-jumlah-puskesmas-di-indonesia

Kusnandar, Viva Budy. "Tingkat Kemiskinan Jakarta Capai Level Tertinggi dalam 20 Tahun Terakhir." Katadata, 16 Juli 2021. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/16/tingkat-kemiskinan-jakarta-capai-level-tertinggi-dalam-20-tahun-terakhir

Media Indonesia. "Masyarakat yang Ingin Prioritas Ekonomi Lebih Tinggi dari Kesehatan di Survei LSI." Media Indonesia, 18 Juli 2021. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/419392/masyarakat-yang-ingin-prioritas-ekonomi-lebih-tinggi-dari-kesehatan-di-survei-lsi

Nielsen. "2019 ad spend closes with positive trends." Nielsen.com, 11 Maret 2020. https://www.nielsen.com/id/en/press-releases/2020/2019-adspend-closes-with-positive-trends/

Nielsen. "Media Cetak Mampu Mempertahankan Posisinya." Nielsen. com, 6 Desember 2017. https://www.nielsen.com/id/en/press-releases/2017/media-cetak-mampu-mempertahankan-posisinya/

Nielsen. "Tren Baru Di Kalangan Pengguna Internet Di Indonesia." Nielsen.com, 26 Juli 2017. https://www.nielsen.com/id/en/press-releases/2017/tren-baru-di-kalangan-pengguna-internet-di-indonesia/

Pinandhita, Vidya. "Pengalaman Lansia Vaksin COVID-19, Sudah Daftar Online Tapi Tak Tercatat." Detik, 26 Februari 2021. https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5473012/pengalaman-lansia-vaksin-covid-19-sudah-daftar-online-tapi-tak-tercatat

Pratama, Aditya. "Tangani Pandemi Covid-19, Doni Monardo Paparkan Peran Vital RT RW." Okezone, 20 Februari 2021. https://nasional.okezone.com/read/2021/02/20/337/2365419/tangani-pandemi-covid-19-doni-monardo-paparkan-peran-vital-rt-rw

Rakhmat, Muhammad Z. "Mengapa Indonesia Harus Berhenti Prioritaskan Ekonomi Saat Pandemi Covid-19: Belajar Dari Negara Lain." The Conversation Indonesia, 20 Mei 2020. https://theconversation.com/mengapa-indonesia-harus-berhenti-prioritaskan-ekonomi-saat-pandemi-covid-19-belajar-dari-negara-lain-139033

Reporter Without Borders. "2021 World Press Freedom Index." Rsf.org. https://rsf.org/en/ranking

Ridhoi, Muhammad Ahsan. "Ketimpangan Ekonomi di Jakarta Melebar Akibat Pandemi." Katadata, 1 Maret 2021. https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/6038b264e3df2/ketimpanganekonomi-di-jakarta-melebar-akibat-pandemi

Rojani, Deden M. "Buruknya Transparansi Data Covid-19 Perparah Penularan." Media Indonesia, 12 September 2021. https://mediaindonesia.com/humaniora/344365/buruknya-transparansi-data-covid-19-perparah-penularan

Safitri, Dewi. "Apa Pentingnya Mengganti Terawan." CNN Indonesia, 14 September 2021. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200914172942-20-546367/apa-pentingnya-menggantiterawan

Safitri, Dewi. "Kenapa Pemerintah Sulit Sekali Jujur Soal Corona?" CNN Indonesia, 3 Februari 2021. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210202161703-20-601408/kenapa-pemerintah-sulit-sekali-jujur-soal-corona

Sari, Nursita. "Anggaran Penanganan Covid-19 DKI Jakarta Rp 10,7 Triliun, Terbanyak untuk Jaring Pengaman Sosial." Kompas, 29 April 2020. https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/29/09291431/anggaran-penanganan-covid-19-dki-jakarta-rp-107-triliun-terbanyak-untuk

Statistik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Penyidikan Kasus Korupsi oleh KPK Terus Berkurang." Dalam Databoks Katadata, 18 Mei 2021. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/18/penyidikan-kasus-korupsi-oleh-kpk-terus-berkurang

Sucipto, Theofilus Ifan. "60% Masyarakat Minta Pemerintah Prioritaskan Kesehatan." Media Indonesia, 18 Oktober 2020. https://m. mediaindonesia.com/humaniora/353814/60-masyarakat-minta-pemerintah-prioritaskan-kesehatan

Sutrisna, Tria. "Viral Identitas Pelapor via JAKI Bocor, Wagub DKI: Yang Bocorkan Disanksi." Kompas.com, 11 Juli 2021. https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/11/14405931/viral-identitas-pelapor-via-jaki-bocor-wagub-dki-yang-bocorkan-disanksi

Tempo. "No Accountability for Covid-19 Funding." Tempo, 2 Juli 2021. https://en.tempo.co/read/1478821/no-accountability-for-covid-19-funding

Tranparency International. "Corruption Perceptions Index 2020." Transparency International. https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl#

Triyoga, Hardani & Ahmad Farhan. "Survei KIC: tvOne Paling Banyak Disaksikan Masyarakat." Viva, 10 Desember 2020. https://www.viva.co.id/berita/nasional/1330333-survei-kic-tvone-paling-banyak-disaksikan-masyarakat

Velarosadela, Rindi Nuris. "Kilas Balik Kronologi Munculnya Kasus Pertama Covid-19 di Indonesia." Kompas.com, 2 Maret 2021. https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/05300081/kilas-balik-kronologi-munculnya-kasus-pertama-covid-19-di-indonesia?page=all

Velarosdela, Rindi N. "Kilas Balik Kronologi Munculnya Kasus Covid-19 di Indonesia." Kompas, 2 Maret 2021. https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/05300081/kilas-balik-kronologi-munculnya-kasus-pertama-covid-19-di-indonesia?page=all

Wardah, Fathiyah. "Indeks Kinerja HAM Pemerintahan Jokowi Dinilai Stagnan." Voa Indonesia, 10 Desember 2015. https://www.voaindonesia.com/a/indeks-kinerja-ham-jokowi-dinilai-stagnan-/3096187.html

Winata, Dhika Kusuma. "Penyidik KPK Taksir Kerugian Korupsi Bansos di Jabodetabek Rp2 Triliun." Media Indonesia, 6 Juli 2021. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/416771/penyidik-kpk-taksir-kerugian-korupsi-bansos-di-jabodetabek-rp2-triliun

World Health Organization. Risk Communication and Community Engagement Readiness and Response to Coronavirus Disease (Covid-19): Interim Guidance, March 19, 2020. https://apps.who.int/iris/handle/10665/331513

Yuganto, Satrio P. "2015: Musim Gugur Pers, Aksi Polisi Menjadi-jadi." Aliansi Jurnalis Independen, 26 Desember 2015. https://aji.or.id/read/berita/479/2015-musim-gugur-pers-aksi-polisi-menjadi-jadi.html

Yuli Nurhanisah dan Abdurahman Naufal. "Vaksinasi Covid-19 Siap Dimulai 13 Januari 2021." IndonesiaBaik.id, Januari, 2021. https://www.indonesiabaik.id/infografis/vaksinasi-covid-19-siap-dimulai-13-januari-2021

# **Produk Hukum**

Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Mobilitas Penduduk Dalam Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). https://jdih.jakarta.go.id/himpunan/produk\_download/11020

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Pengendalian untuk 2019 Penyebaran Corona Virus Disease di Lingkungan Daerah. https://www.kemendagri.go.id/documents/ INMENDAGRI/2020/1585969098INSTRUKSI%20MENTERI%20 DALAM%20NEGERI%20NOMOR%201%20TAHUN%202020.pdf

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. https://bpptik.kominfo.go.id/download/inpres-no-3-tahun-2003-tentang-kebijakan-dan-strategi-nasional-pengembangan-e-government/

Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. https://jdih.jakarta.go.id/himpunan/produk\_download/10497

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 328 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. https://jdih.jakarta.go.id/himpunan/produk\_download/10149

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 413 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/KMK\_No.\_HK.01.07-MENKES-413-2020\_ttg\_Pedoman\_Pencegahan\_dan\_Pengendalian\_COVID-19.pdf

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). https://covid19.kemkes.go.id/download/KMK\_No.\_HK.01.07-MENKES-413-2020\_ttg\_Pedoman\_Pencegahan\_dan\_Pengendalian\_COVID-19.pdf

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sebagai Bencana Nasional. https://covid19.go.id/p/regulasi/keputusan-presiden-republik-indonesia-nomor-12-tahun-2020

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019). https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176072/Keppres\_Nomor\_7\_ Tahun\_2020.pdf

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru. https://disdik.jakarta.go.id/statics/upload/1621220081957-PERGUB%20 NO.%2032%20TAHUN%202021.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) Di Lingkungan Pemerintah Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/132742/PMDN\_No\_20\_Tahun\_2020\_-\_COVID-19.pdf

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/132794/Perpres%20Nomor%2082%20Tahun%202020.pdf

Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 199 Tahun 2020 Tentang Komunikasi Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). https://www.kemkes.go.id/resources/download/pengumuman/SE%20Menkes%20-%20Komunikasi%20Covid-19.pdf

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Menuju Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Bentuk Protokol Penyelenggaraan Ekosistem Komunikasi dan Informatika. http://jdih.kominfo.go.id/produk\_hukum/view/id/757/t/surat+edaran+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+6+tahun+2020

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Menuju Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Bentuk Protokol Penyelenggaraan Ekosistem Komunikasi dan Informatika

https://jdih.kominfo.go.id/produk\_hukum/unduh/id/757/t/surat+edaran+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+6+tahun+2020

Surat Keputusan Bersama Empat Menteri Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.8/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). https://covid19.go.id/storage/app/media/Regulasi/2020/November/Salinan%20SKB%20 PTM.pdf

Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45370/uu-no-40-tahun-1999









Penelitian ini terlaksana atas dukungan rakyat Amerika Serikat melalui USAID. Keseluruhan isi dalam panduan ini merupakan tanggung jawab Remotivi serta tidak mencerminkan pandangan Internews, USAID, atau pemerintah Amerika Serikat.

